

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN (RPIK)**



DISUSUN OLEH:

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN GUNUNG MAS**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIP) Gunung Mas dapat tersusun. Uraian yang disampaikan dalam muatan Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ruang lingkup, arahan, dan pedoman teknis sebagai penjabaran yang akan digunakan sebagai landasan Rencana Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Gunung Mas Tahun 2019-2039.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten 2019 - 2039 ini disusun atas kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya (UPR).

Akhirnya kami menyadari bahwa masih ada kekurangan baik pada proses penyusunan hingga muatan dari Naskah Akademik ini. Kami harapkan sumbangsih perbaikan, kritik, dan saran yang membangun demi kesempurnaan Peraturan Daerah yang nantinya akan disusun. Semoga bermanfaat, terima kasih.

Gunung Mas, November 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	4
1.2	Tujuan	5
1.3	Sasaran.....	5
1.4	Manfaat	6
1.5	Permasalahan Pengembangan Industri	6
1.6.	Sistematika Pelaporan.....	7.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1	Kajian Teoritis/Konsepsi	10
2.1.1	Teori Lokasi	10
2.1.2	Faktor Penentu Lokasi Industri	10
2.1.3	Aspek Produksi	11
2.1.4	Distribusi Bahan Input dan Output.....	11
2.1.5	Pemasaran Output Produksi	12
2.1.6	Faktor Eksternal	13
2.2	Kajian Terhadap Asas Terkait Penyusunan Norma.....	14
2.3	Kajian Terhadap Kondisi dan Permasalahan yang Dihadapi	14
2.3.1	Aspek Demografis	14
2.3.2	Aspek Pertumbuhan Ekonomi	17
2.3.3	Aspek Sumber Daya Industri	32
2.3.4	Aspek Sarana dan Prasarana	40

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN TERKAIT

3.1	Visi dan Misi Pembangunan Industri	54
-----	--	----

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1	Landasan Filosofis	64
4.2	Landasan Sosiologis	65
4.3	Landasan Yuridis	66

BAB V RUANG LINGKUP, SASARAN, DAN ARAHAN PENGATURAN

5.1	Ruang Lingkup.....	68
5.2	Sasaran	68
5.3	Arahan Pengaturan.....	68
5.4	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri.....	70
5.5	Strategi Pembangunan Industri.....	71
5.6	Program Pembangunan Industri	72
5.7	Pengembangan Perwilayahan Industri	76
5.8	Pembangunan Sumberdaya, Teknologi, Inovasi, Kreativitas dan Pembiayaan Indusrti.....	80
5.9	Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Industri.....	81
5.10	Pemberdayaan Industri	83
5.11	Sasaran Kualitatif dan Kuantitatif Program.....	85

<u>BAB VI PENUTUP</u>	
6.1	Kesimpulan..... 88
6.2	Saran 88
DAFTAR PUSTAKA89	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH91	

BAB I

PENDAHULUAN

NASKAH AKADEMIK RPIK GUNUNG MAS 2019-2039

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju (RIPIN 2015-2035).

Sinergitas arah pembangunan industri serta industrialisasi sektor-sektor lokal potensial secara berkelanjutan merupakan solusi untuk mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (engine of growth), di masing-masing pulau, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah termasuk di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (RPJMN 2015-2019). Permasalahan sektor ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah menjadi isu utama dalam perencanaan pembangunan. Hal ini menyangkut upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografi, demografi, dan corak daerah yang paling mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Permasalahan dalam bidang ekonomi antara lain menyangkut optimalisasi lahan pertanian, ketersediaan lapangan kerja, pengangguran, pengembangan industri hilir, penanganan budidaya perikanan, kesejahteraan nelayan, pengembangan tataniaga komoditas, pemanfaatan potensi tambang, dan masih rendahnya investasi (RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021).

Kabupaten Gunung Mas terletak antara $\pm 0^{\circ} 18' 00''$ lintang selatan - $01^{\circ} 40' 30''$ lintang selatan dan $\pm 113^{\circ} 01' 00''$ bujur timur $114^{\circ} 01' 00''$ bujur timur. Secara geografis administratif, Kabupaten Gunung Mas dibatasi oleh: Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat, Kabupaten Murung Raya di sebelah utara, Kabupaten Kapuas di sebelah Timur Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya di sebelah selatan. (Gambar 2.1). Kabupaten Gunung Mas beribukota di Kuala Kurun dengan Luas wilayah sebesar 10.804 Km^2 dan jumlah penduduk 115.054 jiwa.

Hingga saat ini Kabupaten Gunung Mas belum terlibat dalam perdagangan produk industri nasional dan internasional secara langsung. Walaupun posisinya strategis karena berdekatan dengan Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, serta ketersediaan jaringan jalan yang memadai menuju simpul-simpul distribusi produk industri nasional-internasional yaitu pelabuhan laut (Kumai di Kabupaten Kotawaringin Barat, Segintung di Kabupaten Seruyan, Bahaur di Kabupaten Pulang Pisau, Sampit di Kotawaringin Timur, hingga Pelabuhan-Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan). Komoditi ekspor masih belum dapat dihasilkan di Kabupaten Gunung Mas. Beberapa Produk IKM yang telah dihasilkan di Kabupaten Gunung Mas sebagian besar berfokus pada industri kayu dan pangan.

Dalam upaya menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 maka Kabupaten Gunung Mas perlu menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten-Kota (RPIK), sebagai upaya awal membangun sektor industri Kabupaten Gunung Mas secara komprehensif, efektif, dan berkelanjutan.

1.2 TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Gunung Mas 2019-2039 yaitu:

- A. Terjalin sinergitas arah pembangunan sektor industri nasional dan daerah
- B. Pembangunan sektor industri daerah yang efektif dan terarah
- C. Efisiensi penggunaan dan pengelolaan sumber daya untuk tujuan pembangunan sektor industri
- D. Hilirisasi sektor industri

1.3 SASARAN

Sasaran penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Gunung Mas 2019-2039 yaitu:

- A. Pembangunan sektor industri daerah secara optimal
- B. Pengurangan dampak lingkungan akibat pembangunan sektor industri
- C. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.4 MANFAAT

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Gunung Mas 2019-2039 memuat:

- A. Potensi Sumber Daya Industri Daerah
- B. Perwilayahan industri dalam delineasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Provinsi dan Kabupaten
- C. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial dan ekonomi serta daya dukung lingkungan (keberlanjutan).

RPIK Gunung Mas 2019-2039 merupakan kajian awal pengembangan industri untuk mempersiapkan pola ruang kabupaten khususnya Kawasan Pembangunan Industri (KPI), sarana, dan infrastrukturnya, sehingga ketika kedepannya dapat dilakukan pembangunan Kawasan Industri (KI) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).

1.5 PERMASALAHAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

Isu strategis terkait permasalahan pengembangan industri yang telah dijabarkan pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu:

- A. Keterbatasan dana pembangunan dan pengembangan IKM/UKM
- B. Kurangnya tingkat profesionalisme SDM SOPD Perdagangan, Koperasi, dan UKM sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat
- C. Belum optimalnya jaringan kerjasama antar pelaku usaha
- D. Belum adanya pusat informasi produk industri
- E. Kurangnya inovasi produk

Isu strategis terkait pengembangan industri berdasarkan data empiris adalah:

- A. Kurangnya kepedulian SOPD Perdagangan, Koperasi, dan UKM terhadap kondisi dan pengembangan IKM
- B. Belum terlaksana dan belum dimanfaatkannya transaksi secara online oleh pelaku usaha sebagai bagian dari pilihan pasar/pemasaran
- C. Infrastruktur jaringan prasarana yang kurang memadai di beberapa wilayah
- D. Kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta jaringan kerjasama pengusaha yang terbatas

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika RPIK Gunung Mas 2019-2039 mengacu/berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan susunan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Menguraikan secara kualitatif mengenai aspek geografi, demografi, ekonomi, industri, potensi dan permasalahan utama pembangunan industri dan pentingnya rencana pembangunan industri Provinsi/Kabupaten/Kota

2. Dasar Hukum

3. Sistematika Penulisan

B. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografi, aspek demografi, serta aspek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan bandar udara, air, dan listrik, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri (minimum tiga tahun terakhir)

2. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, lembaga diklat dan litbang serta pembiayaan industri.

3. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi dan infrastruktur penunjang seperti lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan.

4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan tentang pengembangan IKM, unit pelayanan teknis (UPT), jumlah tenaga penyuluh lapangan (TPL), konsultan IKM, dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM.

C. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

1. Visi dan Misi Pembangunan Industri Daerah
2. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Sasaran Pembangunan Industri Provinsi/Kabupaten/Kota

Meliputi Pertumbuhan sektor industri, Kontribusi industri non migas terhadap PDRB, Nilai ekspor produk industri, Jumlah tenaga kerja di sektor industri, Nilai Investasi sektor industri

D. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

1. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

2. Program Pembangunan Industri

Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Provinsi / Kabupaten / Kota. Penentuan industri unggulan provinsi / kabupaten / kota berdasarkan pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional, serta sasaran dan program pengembangan Industri Unggulan Provinsi/ Kabupaten/Kota

3. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pogram-program yang terkait dengan pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

4. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi

industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri

5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan Industri berupa Kawasan Industri dan/atau kawasan peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri

6. Pemberdayaan Industri

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis/Konsepsi

2.1.1 Teori Lokasi

Secara garis besar teori-teori lokasi menganalisis faktor-faktor spasial terkait lokasi yang akan diperuntukan untuk penempatan industri, terdapat tiga analisis lokasi yang dikemukakan oleh para ekonom regional (Sjafrizal dalam Sudarsono. 2014) yaitu :

Bid-Rent Theories , yaitu analisis Teori Lokasi yang mendasarkan analisa pemilihan lokasi ekonomi pada kemampuan membayar harga tanah (bid-ren) yang berbeda dengan harga pasar tanah (land-rent), sehingga penentuan lokasi untuk kegiatan ekonomi ditentukan oleh nilai bid-rent yang tertinggi. Analisis Teori Lokasi ini dipelopori oleh Von Thunen (1826)

Least Cost Theories , yaitu analisis Teori Lokasi yang mendasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip biaya minimum (Least Cost) . Dalam analisis ini lokasi yang terbaik (optimal) adalah pada tempat dimana biaya produksi dan ongkos angkut adalah pada tempat dimana biaya produksi dan ongkos angkut adalah yang paling kecil. Jika hal tersebut tercapai, maka tingkat keuntungan perusahaan akan menjadi maksimum . Analisis Teori Lokasi ini dipelopori oleh Alfred Weber (1929)

Market Area Theories, yaitu analisis Teori Lokasi yang mendasarkan analisa pemilihan lokasi kegiatan ekonomi pada prinsip luas pasar (Market Area) terbesar yang dapat dikuasai perusahaan . Luas pasar tersebut adalah mulai dari lokasi pabrik sampai ke lokasi konsumen yang membeli produk perusahaan tersebut. Jika pangsa pasar yang dikuasai merupakan yang terbesar, maka tingkat keuntungan perusahaan menjadi maksimum. Analisis Teori Lokasi ini diperlopori oleh August Losch (1954).

2.1.2 Faktor Penentu Lokasi Industri

Penentuan lokasi industri melibatkan beberapa aspek secara teori akan diperoleh lokasi yang paling efisien, sehingga hal tersebut akan menarik produsen atau beberapa produsen untuk menjadikan suatu lokasi industri yang terkonsentrasi secara spasial. Dalam menetapkan lokasi industri harus melalui berbagai pertimbangan guna menentukan kalkulasi yang benar mengenai biaya investasi dan biaya produksi, perusahaan harus memanfaatkan berbagai keahlian menyangkut teknis bangunan , ahli daya dukung lahan ,

ahli permesinan, hingga ahli di bidang riset pasar, ahli manajemen, sosiologi, dan ahli di bidang pemerintah atau ahli hukum.

Pada faktor spasial terdapat tiga aspek yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penentuan lokasi industri yaitu: terkait proses produksi, distribusi (pemasaran), dan pasar. Aktivitas tersebut akan senantiasa terus bergerak disetiap aspek ekonomi, sehingga penentuan lokasi akan menganalisis kebutuhan utama ketiga aspek tersebut ditunjang dengan aspek eksternal (Tarigan dalam Sudarsono. 2014).

2.1.3 Aspek Produksi

Produsen untuk menciptakan suatu produk dalam tahap awal akan mempertimbangkan faktor produksi yang berlokasi pada tempat yang efisien, sehingga hal ini akan mendorong produsen untuk memproduksi pada titik sentral lokasi yang akan berkaitan dengan harga tanah ataupun sewa tanah. Tingkat sewa tanah dengan harga mahal berada di pusat pasar dan akan semakin rendah apabila makin jauh dari pasar sehingga akan diperoleh perbandingan antara harga jual dengan biaya produksi, sehingga semakin tinggi kemampuan menyewa tanah semakin besar kegiatan produksi dekat ke pusat pasar. lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja yang memiliki biaya minimum. Weber menjelaskan jika wilayah industri ditentukan oleh iklim yang homogen, konsumen terkonsentrasi pada beberapa pusat, dan kondisi pasar dalam persaingan sempurna, dimana terdapat sumber daya alam seperti air, pasir dan batu bata tersedia dalam jumlah yang memadai, selain itu material lain seperti bahan bakar mineral dan tambang tersedia secara sporadis, serta didukung keadaan tenaga kerja yang tidak menyebar tetapi berkelompok pada lokasi tertentu dengan mobilitas tinggi (Von Thunen dan Weber dalam Sudarsono. 2014).

Biaya transportasi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi lokasi industri berada. Hal ini dapat terjadi apabila penghematan biaya transportasi tenaga kerja per-unit produksi akan lebih efisien daripada tambahan biaya transportasi per-unit produksi dikarenakan berpindahnya lokasi ke pekerja menuju industri (Tarigan dalam Sudarsono. 2014).

2.1.4 Distribusi Bahan Input dan Output

Ongkos angkut memiliki hubungan terhadap jarak yang dihitung setiap ton kilomernya, dalam penghematan ongkos angkut dapat dilakukan jika pengangkutan

sekali jalan dengan muatan besar (ton). Disamping itu , berbeda menurut jienis angkutan yang digunakan, umumnya untuk jarak dekat angkutan truk menjadi efisien, namun untuk angkutan jarak jauh lebih efisien dengan moda transportasi kreta api dengan biaya yang lebih murah . Bila angkutan laut dimungkinkan , maka penggunaan angkutan kapal akan lebih efisien karena ongkos angkutnya untuk setiap ton / kilometer lebih rendah (Sjafrizal dalam Sudarsono. 2014).

Biaya transportasi merupakan faktor utama dalam penentuan lokasi . Biaya transportasi bertambah secara proporsional dengan jarak yang ditempuh, sehingga titik terendah biaya transportasi ialah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi. Biaya transportasi dipengaruhi oleh berat lokasional. Berat lokasional merupakan berat total semua barang berupa input yang harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output ditambah berat output yang akan dibawa menuju pasar (Webber dalam Sudarsono. 2014).

Distribusi barang mayoritas memiliki mobilitas yang tinggi di darat karena memang letak industri di daratan. Sehingga faktor infrastruktur jalan akan berpengaruh terhadap distribusi. Pengaruh infrastruktur publik (jalan, listrik dan telepon) mempengaruhi kegiatan ekonomi dan pertumbuhan suatu wilayah yang memiliki infrastruktur yang memadai (Cahyono dalam Sudarsono. 2014).

2.1.5 Pemasaran Output Produksi

Pemasaran pada industri berkaitan erat dengan harga produk bersangkutan jika hal tersebut dikaitkan antar wilayah harga tersebut akan ditambah dengan biaya transportasi, luas pemasaran akan dipengaruhi oleh kepadatan penduduk semakin padat penduduk maka wilayah pemasaran akan kecil dalam suatu wilayah sehingga produsen akan mencari wilayah yang memiliki penjualan optimal. Pemilihan lokasi yang optimal didasarkan pada kekuatan persaingan antar tempat dan luas pasar yang dapat dikuasai oleh produsen, sehingga permintaan dan penawaran antar tempat merupakan unsur penting dalam menentukan lokasi yang optimal untuk berjalanya operasional perusahaan (Sjafrizal dan Tarigan dalam Sudarsono. 2014).

August Losch (1944) mengungkapkan Teori lokasi Market Area yang melandasi asumsi dasar analisisnya, dalam penjabarannya terdapat tiga asumsi. Pertama , konsumen tersebar secara relatif merata antar tempat, sehingga teori ini cocok diberlakukan di daerah

perkotaan dimana konsentrasi penduduk dan industri relatif merata dibandingkan dengan daerah pedesaan atau pedalaman. Kedua, pada produk homogen persaingan akan sangat ditentukan oleh harga dan ongkos angkut. Ketiga, ongkos angkut per kesatuan jarak (ton/km) adalah sama. Losch berpendapat bahwa lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat dilayani oleh produsen. Semakin jauh tempat produsen dari tempat jualan, konsumen akan semakin enggan membeli karena biaya transportasi untuk mendatangi tempat penjual semakin mahal. Sehingga Losch berpendapat bahwa produsen harus memilih lokasi, yang menghasilkan penjualan terbesar yang identik dengan penerimaan terbesar (Tarigan dalam Sudarsono. 2014).

2.1.6 Faktor Eksternal

Lokasi industri yang berdiri pada suatu wilayah tidak terlepas dari beberapa faktor selain faktor terkait operasional industri juga terdapat faktor eksternal salah satunya peran pemerintah dalam menentukan regulasi penetapan lokasi industri tersebut berada dengan tujuan mengoptimalkan wilayah industri supaya berdampak positif terhadap lingkungan sekitar. Pengusaha selain mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, upah buruh, jaminan keamanan, fasilitas penunjang, daya serap pasar lokal dan aksesibilitas dari tempat produksi ke wilayah pemasaran di tuju. Saat ini faktor stabilitas politik suatu wilayah juga menjadi pertimbangan, terlebih dalam region provinsi/kabupaten yang perlu diperhatikan pemda wilayah setempat terhadap kegiatan usaha. Setelah berlakunya otonomi daerah, kebijakan pajak dan retribusi daerah dapat berbeada daerah satu dengan daerah lain (Tarigan dalam Sudarsono. 2014).

Richardson (1977) menyebutkan metode untuk mengarahkan agar industri dapat berlokasi pada daerah yang telah ditentukan pemerintah, dapat dilakukan dengan cara memerintahkan industri untuk berlokasi pada daerah tersebut, mengalirkan dana pemerintah atau melalui pemberian subsidi kepada industri pada daerah tersebut. Pembangunan prasarana dan perencanaan fisik perumahan dan penyediaan transportasi di dekat tempat-tempat industri potensial yang dengan sendirinya akan menarik industri ke titik pertumbuhan ekonomi. Lokasi industri harus ditunjang dengan fasilitas sosial yang disediakan oleh pemerintah seperti prasarana pendidikan, kursus ketrampilan, prasarana kesehatan, tempat beribadah, prasarana jasa perusahaan (misalnya : perbankan, perhotelan, asuransi, pengangkutan, pelayanan pos dan tempat hiburan) dan terpenting

lokasi pemukiman untuk penduduk hal ini untuk tempat tinggal pekerja industri. Fasilitas-fasilitas penunjang tersebut akan menjadi prioritas pengusaha dalam menempatkan lokasi pabrik dan akan menarik investor lain masuk sehingga akan tercipta pusat pertumbuhan ekonomi (Tarigan dalam Sudarsono. 2014).

2.2 Kajian Terhadap Asas Terkait Penyusunan Norma

Dasar hukum penyusunan RPIK Gunung Mas 2019-2039 yaitu:

- Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Permenperin Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP dan RPIK
- Permenperin Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
- Perpres Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035
- RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

2.3 Kajian Terhadap Kondisi dan Permasalahan yang Dihadapi

2.3.1 Aspek Geografis

Kabupaten Gunung Mas terletak antara $\pm 0^{\circ} 18' 00''$ lintang selatan - $010^{\circ} 40' 30''$ lintang selatan dan $\pm 113^{\circ} 01' 00''$ bujur timur $114^{\circ} 01' 00''$ bujur timur. Secara geografis administratif, Kabupaten Gunung Mas dibatasi oleh: Kabupaten Katingan dan Provinsi Kalimantan Barat di sebelah barat, Kabupaten Murung Raya di sebelah utara, Kabupaten Kapuas di sebelah Timur Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya di sebelah selatan. (Gambar 2.1). Kabupaten Gunung Mas beribukota di Kuala Kurun dengan Luas wilayah sebesar 10.804 Km^2 dan jumlah penduduk 115.054 jiwa.

Kabupaten Gunung Mas berada pada rata-rata 50-100 m diatas permukaan laut. Pada siang hari suhu maksimal mencapai sekitar 35.6°C dan malam hari minimum sekitar 21°C , dengan kelembaban rata-rata 75-97%. Rata-rata curah hujan bulanan tertinggi pada bulan April mencapai 443.9 mm^3 dan terendah pada bulan juli yaitu 160.9 mm^3 . dengan

rata-rata hari hujan maksimum 21 hari dan minimum 7 hari setiap bulannya. Puncak kemarau pada Juli - Agustus. Kabupaten Gunung Mas terdiri dari 12 Kecamatan, data kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Data Kecamatan di Kabupaten Gunung Mas

Nama Kecamatan	Ibukota	Luas (Km²)	Persentase Luas
Manuhing	Tumbang talaken	1113	10,30
Manuhing Raya	Tehang	601	5,56
Rungan	Jakatan Raya	710	6,57
Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	738	6,83
Rungan Barat	Barat Rabambang	391	3,62
Sepang	Sepang Simin	397	3,67
Mihing Raya	Kampuri	343	3,17
Kurun	Kuala Kurun	876	8,11
Tewah	Tewah	1079	9,99
Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	1589	14,71
Damang Batu	Tumbang Marikoi	1425	13,19
Miri Manasa	Tumbang Napoi	1542	14,27

Sumber: KDA Gunung Mas. 2018

2.3.1 Aspek Demografi

Aspek demografi membahas jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Aspek demografi dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Aspek Demografi

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Laju Pertumbuhan Penduduk		
	2015	2016	2017	2014-2015	2015-2016	2016-2017
Manuhing	7693	7861	7941	1.44	1.23	1.02
Manuhing Raya	5470	5709	5827	2.55	2.31	2.07
Rungan	9825	10006	10092	1.26	1.06	0.86
Rungan Hulu	6016	6127	6179	1.27	1.06	0.85
Rungan Barat	5743	5894	5898	2.05	1.06	0.07
Sepang	6630	6865	6982	2.14	1.92	1.70
Mihing Raya	5368	5622	5750	2.74	2.51	2.28
Kurun	26173	28273	29467	4.54	4.38	4.22
Tewah	18789	19724	20245	2.98	2.81	2.64
Kahayan Hulu Utara	7999	8333	8459	2.27	1.89	1.51
Damang Batu	3844	4076	4115	2.6	1.78	0.96
Miri Manasa	3917	4039	4099	1.91	1.70	1.49
Total	107467	112484	115054	2.66	2.47	2.28

Sumber: KDA Kabupaten Gunung Mas 2018

2.3.2 Aspek Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gunung Mas

Perkebunan karet masih menjadi komoditas perkebunan utama di Kabupaten Gunung Mas dengan total kebun tahun 2018 seluas 68367 Ha. Sebaran komoditas lain cukup merata di Kabupaten Gunung mas. Gambaran umum dan potensi per sektor pada masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 2.3. Posisi Kabupaten Gunung Mas dalam sektor perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel 2. 3 Gambaran Umum dan Potensi per Kecamatan

No	Kecamatan	Kota Kecamatan	Potensi Sektor Peringkat 1-3 (Berdasarkan Produktivitas dan Luas Pengusahaan)
1	Manuhing	Tumbang Talaken	Karet ² , Kelapa ³ , Kelapa Sawit Rakyat ² , Kelapa Sawit PBS ¹ , Kambing ²
2	Manuhing Raya	Tehang	Perkebunan Umum, Peternakan Umum, Perikanan Umum
3	Rungan	Jakatan Raya	Kelapa Sawit Rakyat ¹ , Kelapa Sawit PBS ³ , Sapi Potong ³ , Kerbau ³ , Ayam Kampung ³ , Perikanan Perairan Umum ² , Budidaya Perairan Umum ³

No	Kecamatan	Kota Kecamatan	Potensi Sektor Peringkat 1-3 (Berdasarkan Produktivitas dan Luas Pengusahaan)
4	Rungan Hulu	Tumbang Rahuyan	Perikanan Perairan Umum ³
5	Rungan Barat	Barat Rabambang	Perkebunan Umum, Peternakan Umum, Perikanan Umum
6	Sepang	Sepang Simin	Karet ³ , Babi ³
7	Mihing Raya	Kampuri	Kerbau ¹ , Telur Ayam Kampung ²
8	Kurun	Kuala Kurun	Karet ¹ , Kelapa ¹ , Kelapa Sawit Rakyat ³ , Kelapa Sawit PBS ² , Sapi Potong ¹ , Kerbau ² , Kambing ³ . Babi ¹ , Ayam Kampung ¹ , Ayam Ras ¹ , Ayam Petelur ¹ , Itik ¹ , Telur Ayam Kampung ¹ , Perikanan Perairan Umum ¹ , Budidaya Perairan Umum ¹
9	Tewah	Tewah	Kelapa ² , Sapi Potong ² , Kambing ¹ , Babi ² , Ayam Kampung ² , Ayam Ras ² , Telur Ayam Kampung ² , Budidaya Perairan Umum ²
10	Kahayan Hulu Utara	Tumbang Miri	Ayam Ras ³
11	Damang Batu	Tumbang Marikoi	Perkebunan Umum, Peternakan Umum, Perikanan Umum
12	Miri Manasa	Tumbang Napoi	Perkebunan Umum, Peternakan Umum, Perikanan Umum

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka. 2018

Tabel 2. 4 Potensi Komoditi Kabupaten Gunung Mas di Tingkat Provinsi

Sektor	Komoditas	Posisi Kab. Gunung Mas terhadap Kabupaten/Kota Provinsi Kalteng	Satuan/Aspek
Perkebunan	Karet	1	Luas (Ha)
Perkebunan	Kopi	3	Luas (Ha)
Peternakan	Babi	2	Populasi Ternak (Ekor)
Kehutanan	Meranti	1	Vol (M ³)
Kehutanan	Kayu Gergajian	2	Vol (M ³)
Pertambangan	Zircon	1	Luas (Ha)
Pertambangan	Emas	3	Luas (Ha)
Pertambangan	Tembaga	1	Luas (Ha)
Pertambangan	Galena	1	Luas (Ha)
Pertambangan	Mineral Logam	1	Luas (Ha)

Sumber: KDA Gunung Mas. 2018

Pertumbuhan sektor industri dapat ditinjau melalui pertumbuhan sektornya dalam PDRB Kabupaten Gunung Mas atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha (Tabel 2.5). Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap keseluruhan PDRB Kabupaten dalam

kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Statistik Industri Kabupaten Gunung Mas disajikan pada Tabel 2.6. Pertumbuhan ekspor impor produk industri Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.7. Perusahaan besar yang terdapat di Kabupaten Gunung Mas terdiri atas perusahaan yang bergerak pada sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan. Data sebaran perusahaan besar di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada Tabel 2.8-2.10.

Tabel 2. 5. Indikator ekonomi (PDRB) Kabupaten Gunung Mas

Lapangan Usaha	2014-2015 (juta rupiah)	Kontribusi sektor 2014-2015 (%)	Laju Pertumbuhan (%)	2016-2017 (juta rupiah)	Kontribusi sektor 2016-2017 (%)	Laju Pertumbuhan (%)	2017-2018 (juta rupiah)	Kontribusi sektor 2017-2018 (%)	Laju pertumbuhan (%)
Sektor Primer (pertanian dll)	1258238.3	33.31	6.33	1376093.1	32.51	5.96	1526094.1	32.40	7,65
Pertambangan dan Penggalian	466675.4	12.35	1.79	510213.9	12.06	9.05	556153.4	11.81	7,63
Industri Pengolahan	335529.3	8.88	5.67	382747.6	9.04	6.71	414332	8.80	4,09
Listrik dan Gas	735.1	0.02	11.37	836.9	0.02	10.20	931.6	0.02	6,40
Utilitas (air bersih dll)	1757.8	0.05	8.56	2189.9	0.05	13.39	2279.9	0.05	-5,26
Konstruksi	436524.3	11.56	9.64	500728.9	11.83	9.19	571728.9	12.14	8,56
Perdagangan	334882.5	8.87	8.65	384323.2	9.08	7.81	437723.7	9.29	8,11
Transportasi dan Pergudangan	63393.1	1.68	7.70	70842.3	1.67	6.87	79662.2	1.69	6,69
Akomodasi	64501	1.71	7.23	75512.1	1.78	7.49	83118.5	1.76	5,58
Informasi dan Komunikasi	45556.4	1.21	2.69	48964.1	1.16	2.56	50901.8	1.08	2,63
Jasa Keuangan	21966.1	0.58	2.06	23352.1	0.55	2.70	24953.3	0.53	3,09
Real Estate	103392.2	2.74	8.22	118847.1	2.81	7.19	132311.5	2.81	5,05
Jasa Perusahaan	1887.8	0.05	6.40	2114.7	0.05	4.66	2257.5	0.05	4,46

Lapangan Usaha	2014-2015 (juta rupiah)	Kontribusi sektor 2014-2015 (%)	Laju Pertumbuhan (%)	2016-2017 (juta rupiah)	Kontribusi sektor 2016-2017 (%)	Laju Pertumbuhan (%)	2017-2018 (juta rupiah)	Kontribusi sektor 2017-2018 (%)	Laju pertumbuhan (%)
Administrasi pemerintahan	230050.5	6.09	12.51	267539.5	6.32	8.80	304321.7	6.46	6,99
Pendidikan	282803.5	7.49	8.70	320049.8	7.56	5.14	357427.1	7.59	5,19
Kesehatan dan sosial budaya	117834.5	3.12	8.60	134891.2	3.19	5.54	151070.9	3.21	5,34
Jasa lainnya	11697.4	0.31	7.52	13018.4	0.31	6.30	14494.1	0.31	3,77

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka. 2017

Tabel 2. 6. Statistik Industri Kabupaten Gunung Mas

NO	INDUSTRI PENGOLAHAN	JENIS PRODUK	STATISTIK							
			JUMLAH UNIT USAHA		NILAI INVESTASI		NILAI PRODUKSI		NILAI BAHAN BAKU	
					(Rp. 000)		(Rp.000)		(Rp.000)	
1	PANGAN	A. Roti dan kue	A.	25	A.	905,563	A.	1,051,520	A.	9,559,426
		B. Beras	B.	31	B.	396,200	B.	502,400	B.	181,482
		C. Tempe dan Tahu	C.	19	C.	938,604	C.	848,564	C.	638,230
		D. Kerupuk/keripik	D.	16	D.	76,100	D.	597,270	D.	38,895
		E. Gula Merah	E.	2	E.	4,000	E.	2,000	E.	1,800
		F. Air minum	F.	29	F.	1,035,600	F.	1,213,000	F.	194,400

NO	INDUSTRI PENGOLAHAN	JENIS PRODUK	STATISTIK							
			JUMLAH UNIT USAHA		NILAI INVESTASI		NILAI PRODUKSI		NILAI BAHAN BAKU	
					(Rp. 000)		(Rp.000)		(Rp.000)	
		G. Daging giling/pentol	G.	1	G.	60,000	G.	244,100	G.	192,000
2	SANDANG	A. Pakaian	A.	20	A.	528,750	A.	1,088,330	A.	316,645
3	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	A. Moulding	A.	25	A.	2,176,476	A.	3,442,300	A.	1,060,211
		B. Body kapal	B.	12	B.	403,600	B.	152,500	B.	1,131,000
		C. Meubel/Furniture	C.	21	C.	5,558,357	C.	3,199,560	C.	1,634,350
		D. Batako	D.	12	D.	1,076,398	D.	1,876,052	D.	463,550
		E. Bata Merah	E.	7	E.	1,486,000	E.	1,323,000	E.	332,800
		F. Profil	F.	1	F.	200,000	F.	24,000	F.	5,000
		G. Kaca Hias	G.	2	G.	40,000	G.	38,400	G.	12,000
4	LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIKA	A. Bengkel	A.	38	A.	1,086,300	A.	879,300	A.	385,850
		B. Pengelasan Pagar Teralis dll	B.	26	B.	5,385,900	B.	1,042,220	B.	456,135
		C. Pisau, mandau	C.	12	C.	120,400	C.	135,650	C.	49,100
		D. Reparasi Elektronik	D.	8	D.	235,000	D.	93,000	D.	49,200
5	KERAJINAN	A. Ukiran Kayu	A.	10	A.	106,000	A.	145,050	A.	47,000
		B. Tas Rotan, tikar rotan, dll	B.	31	B.	71,000	B.	112,280	B.	44,250

Tabel 2.7. Volume dan Nilai Impor dan Ekspor Provinsi Kalimantan Tengah

Komoditi	Volume Impor (Kg)			Volume Ekspor (Kg)			Nilai Impor (Mill Dollar)			Nilai FOB Ekspor (US Dollar)		
	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Ampas/sisa industri makanan	-	-	-	103292152	62126085	140767296	-	-	-	7679584	5209777	15014089
Bahan bakar mineral	-	-	-	386035634	763709807	116991752	-	-	-	11715498	16742479	10238230
Bahan nabati untuk anyam-anyaman	-	-	-	24942857	8552707	-	-	-	-	1613914	598689	-
Biji-bijian berminyak	-	-	-	6171400	23098630	8014250	-	-	-	2821052	14209187	5137154
Bijih, kerak, dan abu logam	-	-	-	49247820	25832690	40952950	-	-	-	25185523	12230582	30662498
Ikan dan udang	-	-	-	424	518	3072	-	-	-	21190	1997	19462
Kayu dan barang dari kayu	-	-	-	581874372	530248868	797185343	-	-	-	129659073	80987408	103754966
Lemak & minyak hewani/nabati	-	-	-	501451076	259836036	592416635	-	-	-	282408487	156445670	389690797
Jumlah/Total	6141	5697	6469	1653015735	1673405341	1696331298	70.97	63.84	68.51	461104320	286425789	554517196

Sumber: KDA Provinsi Kalteng. 2018

Tabel 2.8. Data Perusahaan Besar Bidang Usaha Pertambangan di Kabupaten Gunung Mas

N O	PERUSAHAAN	IUP	LUAS (HA)	LOKASI	STATUS
1	PT. ALAM SUTERA	Emas (dmp)	332.4	Desa Sumur Mas, Kec. Tewah dan Rungan Hulu	operaasi produksi
2	PT. ALAM SUTERA	Emas (dmp)	400	Desa Sumur Mas, Kec. Tewah dan Rungan Hulu	operaasi produksi
3	PT. ANUGRAH ALAM KATINGAN	Batubara	5,100	Desa Harowu, Kec. Miri Manasa	Eksplorasi
4	PT. ANUGRAH ALAM MANUHING	Batubara	10,000	Desa Lawang Kanji dan Tumbang Maraya Kec. Daman Batu	Eksplorasi
5	CV. BERKAT RUNGAN SEJAHTERA	Zirkon	1,054	Desa Talangkah dan Bereng Baru Kec. Rungan	Eksplorasi

N O	PERUSAHAAN	IUP	LUAS (HA)	LOKASI	STATUS
		(dmp)			
6	PT. BUMI MAS SEJAHTERA	Zirkon (dmp)	2,529	Desa Taringen Kec. Manuhing	operaasi produksi
7	PT. BUMI SELARIS	Zirkon (dmp)	10,000	Desa Pilang Munduk dan Tumbang Empas Kec. Kurun dan Manuhing Raya	Eksplorasi
8	PT. BUMI INDAH KAYA ABADI	Zirkon (dmp)	3,000	Desa Sepang Simin Kec. Sepang	Eksplorasi
9	PT. BUMI MAS LESTARI	Batubara	9,785	Desa Lawang kanji Kec. Damang Batu	Eksplorasi
10	PT. BLACK DIAMOND MINING	Batubara	7,850	Desa Tanjung Riu, Tewang pajangan an Tumbang Miwan Kec. Kurun dan tewah	Eksplorasi
11	PT. CAKRA EKA CEMERLANG	Galena (dmp)	4,431	Desa Tumbang Mahuroi Kec. Damang Batu	Eksplorasi
12	PT. CAKRA EKA CEMERLANG	Galena (dmp)	5,569	Desa Tumbang Mahuroi Kec. Damang Batu	Eksplorasi
13	PT. COAL IRON SYNERGY	Mineral Logam (dmp)	20,600	Desa Harowu Kec. Miri Manasa	Eksplorasi
14	PT. DAYAK MEMBANGUN PRATAMA	Mineal Logam (dmp)	1,350	Desa Harowu Kec. Miri Manasa	Eksplorasi
15	PT. DAYAK MEMBANGUN PRATAMA	Zirkon (dmp)	4,883.7	Desa Buleng Kec. Manuhing	Operaasi Produksi
16	PT. EAST RASEN MINERAL	Emas (dmp)	5,190	Desa Tumbang Miwan, Tumbang Tariak, Tumbang Hakau dan Pilang Munduk Kec. Kurun dan Manuhing Raya	Eksplorasi
17	CV. ELIAN INDO KALTENG	Zirkon (dmp)	2,793	Desa Kampuri, Tumbang Danau, Dahian Tambuk, Tumbang Hakau dan Hurung Bunut	Eksplorasi
18	PT. FIBER KAKEN INDONESIA	Zirkon (dmp)	1,904.80	Desa Taringen Kec. Manuhing	Operaasi Produksi
19	PT. GUNUNG MAS COALINDO	Zirkon (dmp)	9,317	Desa Sepang Simin Kec. Sepang	Eksplorasi
20	PT. GENSIS MINERAL BORNEO	Batubara	8,770	Desa Penda Rangas dan Tumbang Lapan Kec, Kahayan Hulu Utara	Eksplorasi

N O	PERUSAHAAN	IUP	LUAS (HA)	LOKASI	STATUS
				dan Miri Mansa	
21	PT. GENESIS BUMI KALIMANTAN	Batubara	6,770	Desa Tumbang Posu dan Batu Tangkui Kec. Kahayan Hulu Utara	Eksplorasi
22	CV. GITA KARUNIA	Zirkon (dmp)	10,220	Desa Dahian Tambuk, Kampuri, Rangan Tate, Tewai Baru da Sepang Kec. Mihing raya dan Sepang	Eksplorasi
23	PT. GANDANG GARANTUNG	Batubara	10,000	Desa Tmb. Lambaing, Teluk lawah, Tbg Beren, Upun Batu, Batu Nyiwuh, Tumbang Habaon	Eksplorasi
24	PT. GUNUNG TIMANG ABADI	Batubara	2,850	Desa Tumbang manyangan, Sarerangan dan Tumbang Lambaing Kec. Kurun dan Kec. Tewah	Eksplorasi
25	PT. HASNUR JAYA UTAMA	Batubara	4,360	Desa Batu Nyapau, Tumbang Pajangei, dan Teluk Lawah, Kec. Tewah	Eksplorasi
26	PT. INVESTASI MANDIRI	Batubara	5,590	Desa Taja Urap, Kec. Tewah dan Kahayan Hulu Utara	Eksplorasi
27	CV. INVESTASI MANDIRI	Zirkon (dmp)	2,032	Desa Tewang Pajangan dan Tumbang Miwan Kec. Kurun	Operaasi Produksi
28	PT. INDO PENTA JAYA SUKSES	Batubara	2,800	Desa Taja Urap, Kec. Tewah dan Kahayan Hulu Utara	Eksplorasi
29	PT. INDO PENTA JAYA SUKSES	Batubara	4,280	Desa Taja Urap, Kec. Tewah dan Kahayan Hulu Utara	Eksplorasi
30	PT. INTI BARA PELITA	Batubara	10,000	Desa Fajar Kahayan, Taringen, Tumbang Keruh, Tumbang Sepan di Tumbang Keruh, Kec. Manuhing	Eksplorasi
31	PT. ILLUMNE ZIRKON INDONESIA	Zirkon (dmp)	7,104	Desa Pematang Limau, Tampelas, Sepang Kota dan Sepang Simin, Kec. Sepang	Eksplorasi
32	PT. JUWANA UTAMA PERKASA	Emas (dmp)	9,961	Desa Sey Antai dan Desa Tumbang Rahuyan Kecamatan Rungan	Eksplorasi
33	PT. JOIN MANDIRI SUKSES	Batubara	10,000	Desa Tumbang Beren Kec. Tewah	Eksplorasi
34	PT. JOIN MANDIRI SUKSES	Batubara	9,371	Desa Tumbang Beren Kec. Tewah	Eksplorasi
35	PT. KAHAYAN MINERAL	Emas (dmp)	8,450	Desa Tumbang Haputung, Rangan Hiran dan Harowu Kec. Miri Manasa	Eksplorasi
36	PT. KALIMANTAN MINING AND MINERAL	Mineal Logam (dmp)	24,800	Desa Rangan Hiran dan Harowu Kec. Miri Manasa	Eksplorasi
37	PT. KALTENG MEGAH ABADI	Emas (dmp)	8,100	Desa Tumbang Rahuyan Batu Nyapau, Kec. Rungan Hulu dan Tewah	Eksplorasi
38	PT. KALTENG NALITO	Emas (dmp)	10,000	Desa Tumbang Ponyoi Kec. Kahayan Hulu Utara	Eksplorasi
39	PT KAPUAS MINING MAKMUR	Batubara	9,507	Desa Luwuk Langkuas, Kec. Rungan	Eksplorasi

N O	PERUSAHAAN	IUP	LUAS (HA)	LOKASI	STATUS
40	CV. KENCANA MAKMUR MANDIRI	Batubara	5,021	Desa Penda Pilang dan Batu Nyapau Kec. Kurun dan Kec. Tewah	Eksplorasi
41	PT. KATINGAN MINERAL	Emas (dmp)	9,941	Desa Tumbang Takoi, Tumbang Kurik, Tumbang Sian an Tumbang Lapan Kec. Kahayan hulu Utara	Eksplorasi
42	PT. KATINGAN SURYA HARAPAN	Bijih Besi	10,000	Desa Keretausurian dan Tumbang Anoi, Kec. Damang Batu	Eksplorasi
43	PT. KALIMANTAN USAHA SEJAHTERA	Batubara	9,000	Desa Tumbang Maraya dan Lawang Kanji Kec. Damang Batub	Eksplorasi
44	PT. KALIMANTA USAHA SEJAHTERA	Batubara	9,000	Desa Teahang Kec. Manuhing Raya dan Kec. Damang Batu	Eksplorasi
45	PT. MAKMUR PALANGKA LESTARI	Zirkon	2,175	Desa Tumbang Miwan dan Tewang Pajangan Kec. Kurun	Eksplorasi
46	PT. MAHKOTA GELAM MULIA	Zirkon	5,000	Desa Bereng Baru, Talangkah, Luwuk Langkuas dan Bereng Balawan Kec. Rungan dan Manuhing	Eksplorasi
47	PT. MENTARI KHATULISTIWA	Zirkon (dmp)	9,707	Desa Bereng Baru, Talangkah, Luwuk Langkuas dan Bereng Balawan Kec. Rungan dan Manuhing	Eksplorasi
48	PT. MIRI MINERAL MINING	Tembaga (dmp)	8,315	Desa Tumbang Siruk, Tumbang Napoi, Kuroi, Tumbang Manyoi, Mangkuhung dan Tumbang Masukih	Eksplorasi
49	PT. MITRA KREASI BERSAMA	Batubara	1,380	Desa Teluk Lawah, Tumbang Tambirah Kec. Tewah	Eksplorasi
50	PT.MEGA CITRA ABADI	Batubara	10,000	Desa Taringen, Tumbang Karah, Tumbang Sepan, Tumbang Keruh, dan Tatas Ranggau dan Jalemu, Kec. Rungan dan Manuhing	Eksplorasi
51	CV. NUSSA PERKASA NUSANTARA	Batubara	4,326	Desa Bereng Balawan Taringen, Taringen, Tatas Ranggau, dan Jalemu, Kec. Manuhing dan Rungan	Eksplorasi
52	PT. PANCA DUTA KALTENG	Emas	10,000	Sesa Jangkit dan Tumbang Lapan	Eksplorasi
53	PT. PASIFIK TAMBANG INDONESIA	Zirkon	11,990	Desa Parempei dan Pematang	Eksplorasi
54	PT. PERSADA MAKMUR SEJAHTERA	Batubara	10,000	Desa Tumbang Baringei Kec.	Eksplorasi
55	PT. PERSADA MAKMUR SEJAHTERA	Batubara	6,200	Deas Tumbang Baringei Kec. Rungan	Eksplorasi
56	PT. PRIMA BARA INDONESIA	Batubara	10,000	Desa bangun Sari Kec. Manuhing	Eksplorasi
57	CV. RUNGAN PERKASA JAYA	Batubara	1,400	Desa Tumbang Siruk Kec. Miri Manasa	Eksplorasi
58	PT. RAHAYU SEJAHTERA	Zirkon	2,500	Desa Hurung Bunut, Dihan Tambuk Kec. Kurun dan Mihing Mansa	Eksplorasi
59	PT. SAHEROI MINERAL PERKASA	Zirkon	2,430	Desa Takaras Kec. Manuhing dan Rungan	Eksplorasi
60	PT. SINAR KUSUMA KALIMANTAN	Zirkon	10,000	Desa Tumbang Hakau, Desan Tumbang Tariak, Tumbang Miwan dan Tewang Pajangan Kec. Kurun	Eksplorasi
61	PT. SINAR USAHA SEJATI II	Batubara	10,000	Desa Karetaurembangun dan Tumbang Anoi Kec. Damang Batu	Eksplorasi
62	PT. SINAR USAHA SEJATI I	Batubara	10,000	Desa Lawang Kanji, Tumbag Maraya dan Tumbang Posu Kec. Damang Batu	Eksplorasi

N O	PERUSAHAAN	IUP	LUAS (HA)	LOKASI	STATUS
63	PT. SINAR KEMBAR LESTARI	Mineral	20,900	Desa Rangan Hiran dan Harowu Kec. Miri Manasa	Eksplorasi
64	PT. SURYA KALIMANTAN SEJATI	Batubara	9,930	Desa Tumbang Kajuei Kec. Rungan	Eksplorasi
65	PT. SURYA KALIMANTAN SEJATI	Batubara	6,800	Desa Tumbang Kajuei Kec. Rungan	Eksplorasi
66	PT. SWI MINERALINDO UTAMA	Batubara	5,360	Desa Tewai Baru Kec. Sepang	Eksplorasi
67	PT. TADJAHAN ANTANG MINERAL	Batubara	10,372	Desa Tumbang Tambirah Kec. Kurun	Eksplorasi
68	PT. TADJAHAN ANTANG MINERAL	Batubara	948.6	Desa Tumbang Tambirah Kec. Kurun	Operaasi Produksi
69	PT. TEOPILA ABADI	Emas (dmp)	1,000	Desa Tumbang Sian, Tumbang Tanjungan, dan Tumbang Takoi Kec. Kahayan Hulu Utara	Eksplorasi
70	PT. TEOPILA ABADI	Emas (dmp)	4,000	Desa Tumbang Lapan dan Desa Penda Rangan Kec. Kahayan Hulu Utara dan Miri Manasa	Eksplorasi
71	PT. TIMUR RAYA MINING	Galena	10,000	Desa Tumbang Takoi Tumbang Ku dan Tumbang ponyoi Kec. Kahayan Hulu Utara dan Damang Batu	Eksplorasi
72	PT. TROIKA MINING INDUSTRIAL	Galena (dmp)	746	Kec. Miri Manasa	Eksplorasi
73	PT. TUNAS ARTHA PERKASA	Zirkon (dmp)	636.6	Desa Taringen dan Takaras	Operaasi Produksi
74	PT. TUNAS ARTHA PERKASA	Zirkon (dmp)	1,464	Desa Taringen dan Takaras Kec. Manuhing	Operaasi Produksi
75	PT. VIKTOR PRIMA BUANA	Emas, Zirkon (dmp)	4,550	Desa Tanjung Karitak, Rabauh, Tuyun, Tumbang Empas, Rangan Tate dan kampuri, Kec. Sepang dan Mihing Raya	Eksplorasi
76	PT. WAHANA SUMBER MAKMUR	Zirkon (dmp)	6,937	Desa Karitak, rabauh, tuyun dan Tumbang Empas, Kec. Sepang dan Tumbang Empas	Eksplorasi
77	PT. WAHANA SUMBER MAKMUR	Zirkon (dmp)	3,067	Desa Tampelas dan Sepang Simin, Kec. Sepang	Eksplorasi
78	PT. TAHASAK SUNGEI KAHAYAN	Batubara	10,000	Kec. Kurun	Operasi
79	PT. PUTRA BINTAN LESTARI	Zirkon (dmp)	1,906	Desa Parempai dan Bereng Baru, Kec. Rungan	Eksplorasi
80	PT. BAWAN PERMAI GROUP	Batuan	10,000	Desa Rabambang Kec. Rungan Barat	Eksplorasi
81	PT. MULTI KARYA PRIMA MANDIRI	Batuan	10,000	Desa Rabambang Kec. Rungan Barat	Eksplorasi
82	NELSON AKAR	Batuan	10,000	Kec. Kurun	Eksplorasi

N O	PERUSAHAAN	IUP	LUAS (HA)	LOKASI	STATUS
83	LODOH	Batuan	15,000	Desa Batu Nyapau, Kec. Tewah	Eksplorasi
84	KOPERASI HANDEP HAPAKAT	Batuan	18,000	Kec. Tewah	Eksplorasi
85	PT. KARYA EKA SAKTI	Batuan	1,648	Desa Tumbang Pasangon, Desa Tumbang Tuwe, Kec. Kahayan Hulu Utara	Eksplorasi
86	CV. PUTRA KAHAYAN	Batuan	10,000	Kec. Tewah	Eksplorasi
87	UJI D KITING	Batuan	5,000	Kec. Kurun	Eksplorasi
88	GELORI NYUNGAU	Batuan	5,000	Kec. Kurun	Eksplorasi
89	PT. MEGA DAYA UTAMA	Batubara	10,000	Desa Bereng Balawan, Taringen, Patas, Tatas Ranggau dan Jalemu, Kec. Manuhing dan Rungan	Eksplorasi

Sumber: Pemda Kab. Gumas. 2019

Tabel 2.9. Data Perusahaan Besar Bidang Usaha Perkebunan Kabupaten Gunung Mas

NO	PERUSAHAAN	PMA/PMDN	LUAS(HA)	LOKASI	NAMA PEMILIK	STATUS
1	PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI	PMDN	14.255	1). Kecamatan Manuhing	WINER ORBADINI	Produksi
2	PT. KALIMANTAN HAMPARAN SAWIT	PMDN	11.854	1). Kecamatan manuhing 2). Kecamatan Manuhing Raya	Wliiam Leo Bandung	Produksi
3	PT. ARCHIPELAGO TIMUR ABADI	PMDN	11.675	1). Kecamatan Kurun	USMAN SUSANTO	Produksi
4	PT. FLORA NUSA PERDANAN	PMDN	8.678	1). Kecamatan Rungan	I PUTU KUSA, SH	Produksi
5	PT. AGRO LESTARI SENTOSA	PMDN	20,000	1). Kecamatan Manuhing 2). Kecamatan Rungan	JO DAUD DHARSONO	Produksi
6	PT. MULIA SAWIT AGRO SENTOSA	PMDN	5.269	1). Kecamatan manuhing 2). Kecamatan Rungan	KURNIA LUKMAN GAUTAMA	Produksi
7	PT. KAHAYAN AGRO PLANTATION	PMA (Inggris)	17,500	1). Kecamatan Damang Batu 2). Kecamatan Kahayan Hulu Utara 3). Kecamatan Tewah	Razual Yahya	Produksi
8	PT. BRKALA MAJU BERSAMA I	PMA	13,490	1). Kecamatan Kurun 2). Kecamatan Tewah	MOHAMED DAUD BIN MOHAMED	Produksi
9	PT. BRKALA MAJU BERSAMA II	PMA	2.138	1). Kecamatan Manuhing	MOHAMED DAUD BIN MOHAMED	Produksi
10	PT. PRASETYAMITRA MUDA	PMDN	13.883	1). Kecamatan manuhing	WILLIAM KRISNA	Pembangunan

NO	PERUSAHAAN	PMA/PMDN	LUAS(HA)	LOKASI	NAMA PEMILIK	STATUS
				2). Kecamatan Rungan		
11	PT. BUMI AGRO PRIMA	PMDN	4.515	1). Kecamatan Sepang 2). Kecamatan Manuhing Raya	MULIA BONGSO	Pembangunan
12	PT. MINA PADI PLANTATION	PMDN	3,700	1). Kecamatan Tewah	-	Pembangunan
13	PT. KURNIA KUALA KURUN	PMDN	17,000	1). Kecamatan Sepang	TOMMY DELSY,DH	Pembangunan
14	PT. JAYA JADI UTAMA	PMDN	13.645	1). Kecamatan Manuhing	ELAN S. GAHU	Pembangunan
15	PT. KURUN SUMBER REZEKI	PMDN	13.413	1). Kecamatan Sepang 2). Kecamatan Mihing Raya	CORNELIS N. ANTUN	Pembangunan
16	PT. GUMAS ALAM SUBUR	PMDN	14.355	1). Kecamatan Kurun 2). Kecamatan Mihing Raya	CORNELIS N. ANTUN	Pembangunan
17	PT. HARAPAN SUBUR SENTOSA	PMDN	6.394	1). Kecamatan Kahayan Hulu Utara 2). Kecamatan Tewah	ROBERT R. CYPHER	Pembangunan
18	PT. MANYANGAN JAYA	PMDN	6.267	1). Kecamatan Sepang Simin 2). Kecamatan Mihing Raya	SURIA	Pembangunan
19	PT. MANYANGAN JAYA	PMDN	12.473	1). Kecamatan Rungan Hulu 2). Kecamatan Rungan	SURIA	Pembangunan
20	PT. TEWAH BAHAN LESTARI	PMDN	12,100	-	-	Pembangunan
21	PT. TUNAS OMEGA PRATAMA	PMDN	11,713.51	-	-	Pembangunan
22	PT. PERMATA EMAS LESTARI	PMDN	15,490.80	-	-	Pembangunan
23	KOPERASI PENYANG BELUM	PMDN	5.525	1). Kecamatan Mihing Raya	-	Pembangunan

Sumber: Pemda Kabupaten Gumas. 2019

Tabel 2.10. Data Perusahaan Besar Bidang Usaha Kehutanan Kabupaten Gunung Mas

NO	PERUSAHAAN	PMA/PMDN	IUP	LUAS (HA)	LOKASI	NAMA PEMILIK	STATUS
1	PT. SIKATAN WANA RAYA	PMDN	IUPHHK-HA	49.4	1). Kecamatan Miri Manasa 2). Kecamatan Kahayan Hulu Utara 3). Kecamatan Damang Batu	DEDY HERALD, SH.	Produksi
2	PT. EAST POINT INDONESIA	PMDN	IUPHHK-HA	50.665	1). Kecamatan Manuhing Raya 2). Kecamatan Runga Hulu 3). Kecamatan Rungan Barat	Ir. KEPAS RINGKAI	Produksi
3	PT. HASIL KALIMANTAN JAYA	PMDN	IUPHHK-HA	49.5	1). Kecamatan Rungan	Ir. H. PERMANA NURYADI	Produksi
4	PT. CARUS INDONESIA	PMDN	IUPHHK-HA	48.639	Kecamatan Damang Batu	DRS EKO PRATOMO	Produksi
5	PT. HUTAN DOMAS RAYA	PMDN	IUPHHK-HA	99.87	Kahayan Hulu Utara	RUSLIMNOOR LINUAR	Produksi
6	PT. BUMI MAS PERMATA ABADI	PMDN	IUPHHK-HA	47.7	1). Kecamatan Tewah	AMIN SUPRIADI	Produksi
7	PT. TAIYOUNG ENGREEN	PMA (Inggris)	IUPHHK-HTI	2.495	Kecamatan Mihing Raya	SAPTO WINARDI	Produksi
8	HABAON INDAH	PMA	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Mihing Raya Kel. Kampuri	SUGINO	-
9	CITRA KAHAYAN	PMA	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Mihing Raya Kel. Kampuri Desa Tumbang Mepas	CITRA PUTRI KAHAYAN	-
10	HARMOKO	PMDN	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Mihing Raya Kel. Kampuri	HARMOKO	-
11	T. JIMMY CANDRA	PMDN	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Rungan Desa Bereng Malaka	T. JIMMY CHANDRA	-
12	JUITA	PMDN	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Rungan Desa Bereng Malaka	JJUITA	-
13	MEKAR INDAH	PMDN	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Mihing Raya Desa Tumbang Empas	SEPRI ARYANTO	-
14	MIHING RAYA	PMDN	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Mihing Raya Desa Tumbang Empas	ADIE	-
15	KARYA SEPAKAT	PMDN	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Mihing Raya Kel. Kampuri Desa Tumbang Mepas	NEDY ARYANTO	-
16	CV. TERAS PERKASA INDOTAMA	PMDN	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Manuhing Desa Taringen	BUDI SANTOSA	-
17	KARYA GUMAS	PMDN	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Mihing Raya Desa Kampuri	RISMANSON	-

NO	PERUSAHAAN	PMA/PMDN	IUP	LUAS (HA)	LOKASI	NAMA PEMILIK	STATUS
18	KOPERASI LAWANG MANGALUNG	PMDN	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Manuhing Raya, Desa Luwuk Langkuas	LEOLESA	-
19	UD. JAYA ABADI SAWMIL	PMDN	IUIPHHK/PHHK	-	Kecamatan Tewah, Desa Teluk Lawah	HERDI SIWUNG, A.Md	-

Sumber: Pemda Kabupaten Gumas. 2019

2.3.3 SUMBER DAYA INDUSTRI

A. Sumber Daya Manusia

1. Wirausaha Industri

Yang termasuk dalam wirausaha industri Kabupaten Gunung Mas adalah semua industri yang kepemilikan dan lokasi usahanya berada di dalam wilayah administrasi Kabupaten. Berdasarkan data tahun 2019, tercatat terdapat 348 unit usaha dengan total tenaga kerja sebesar 749 orang (Tabel 2.11).

Tabel 2.11. Data Perusahaan Besar Bidang Usaha Kehutanan Kabupaten Gunung Mas

NO	INDUSTRI PENGOLAHAN	JENIS PRODUK	STATISTIK				
			JUMLAH UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI	NILAI PRODUKSI	NILAI BAHAN BAKU
					(Rp. 000)	(Rp.000)	(Rp.000)
1	PANGAN	A. Roti dan kue	25	46	905,563	1,051,520	9,559,426
		B. Beras	31	57	396,200	502,400	181,482
		C. Tempe dan Tahu	19	44	938,604	848,564	638,230
		D. Kerupuk / keripik	16	37	76,100	597,270	38,895
		E. Gula Merah	2	4	4,000	2,000	1,800
		F. Air minum	29	48	1,035,600	1,213,000	194,400
		G. Daging giling/pentol	1	4	60,000	244,100	192,000
Sub-Total			123	240	3,416,067	4,458,854	10,806,233
2	SANDANG	Pakaian	20	32	528,750	1,088,330	316,645
3	KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN	A. Moulding	25	60	2,176,476	3,442,300	1,060,211
		B. Body kapal	12	19	403,600	152,500	1,131,000
		C. Meubel / Furniture	21	73	5,558,357	3,199,560	1,634,350
		D. Batako	12	28	1,076,398	1,876,052	463,550
		E. Bata Merah	7	29	1,486,000	1,323,000	332,800
		F. Profil	1	2	200,000	24,000	5,000
		G. Kaca Hias	2	5	40,000	38,400	12,000
Sub-Total			80	216	10,940,831	10,055,812	4,638,911
4	LOGAM, MESIN DAN ELEKTRONIKA	A. Bengkel	38	71	1,086,300	879,300	385,850
		B. Pengelasan Pagar	26	66	5,385,900	1,042,220	456,135

NO	INDUSTRI PENGOLAHAN	JENIS PRODUK	STATISTIK					
			JUMLAH UNIT USAHA	TENAGA KERJA	NILAI INVESTASI	NILAI PRODUKSI	NILAI BAHAN BAKU	
					(Rp. 000)	(Rp.000)	(Rp.000)	
		Teralis dll						
		C. Pisau, mandau	12	21	120,400	135,650	49,100	
		D. Reparasi Elektronik	8	9	235,000	93,000	49,200	
Sub-Total			84	167	6827600	2150170	940285	
5	KERAJINAN	A. Ukiran Kayu	10	14	106,000	145,050	47,000	
		B. Tas Rotan, tikar rotan, dll	31	80	71,000	112,280	44,250	
Sub-Total			41	94	177000	257330	91250	
Total			348	749	21,890,248	18,010,496	16,793,324	

Sumber: Pemda Kabupaten Gumas. 2019

Berdasarkan data IKM Kabupaten Gunung Mas, industri kimia dan bahan bangunan khususnya meubel/furniture menjadi komoditi industri dengan nilai produksi tertinggi di Kabupaten Gunung Mas.

2. Tenaga Kerja Industri

Masyarakat Kabupaten Gunung Mas yang bekerja secara langsung dan secara tidak langsung pada sektor industri pengolahan jumlahnya mengalami peningkatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan geliat sektor industri pengolahan sangat baik sehingga berdampak pada kebutuhan jumlah tenaga kerja pada sektor ini yang terus meningkat (Tabel 2.12).

Tabel 2. 12. Jumlah Penduduk Usia Angkatan Kerja Berdasarkan Lapangan Pekerjaan

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2016			2017			2018		
		Jenis Kelamin		Total	Jenis Kelamin		Total	Jenis Kelamin Total		Total
		L	P		L	P		L	P	
1	Pertanian, Perkebunan,	13050	9865	22915	10408	10937	21345	10717	11220	21937

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2016			2017			2018		
		Jenis Kelamin		Total	Jenis Kelamin		Total	Jenis Kelamin Total		Total
		L	P		L	P		L	P	
	Kehutanan, Perburuan, Perikanan									
2	Pertambangan dan Penggalian	13210	531	13741	18063	2248	2311	17253	1654	18907
3	Industri Pengolahan	321	106	427	743	365	1108	768	548	1316
4	Infrastruktur	59	-	59	106	-	106	178	-	178
5	Konstruksi	568	-	568	331	-	331	927	72	999
6	Perdagangan	3667	4510	8177	3006	4605	7611	2555	4425	6980
7	Angkutan, Gudang, dan Komunikasi	353	62	415	223	-	223	556	-	558
8	Lembaga Keuangan, Asuransi, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0	-	0	502	210	712	196	56	252
9	Jasa Kemasyarakatan	2910	3079	5989	2549	2490	5039	3981	3772	7753

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka. 2018

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha/industri kecil menengah (UKM/IKM), perusahaan industri skala kecil dan menengah di Kabupaten Gunung Mas masih dilaksanakan secara individual dan parsial. Keberadaan kelompok usaha yaitu beberapa pengusaha yang bergabung dalam satu kesatuan kelompok usaha yang sama masih sangat kecil disetiap Kecamatan. Perusahaan industri kecil dan menengah secara individual dan parsial tentunya kurang *sustainable* mengingat modal, keahlian, peralatan, dan aspek produksi lain untuk masing-masing pengusaha sangat terbatas.

3. Pembinaan Industri

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunung Mas tahun 2019-2024, strategi dan arah kebijakan terkait pembinaan IKM dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13. strategi dan arah kebijakan terkait pembinaan IKM

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan ketahanan sosial masyarakat desa	Program peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa
			Pengembangan usaha mikro bagi masyarakat miskin	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
			Peningkatan kualitas pembiayaan bagi usaha mikro kecil dan menengah	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
		Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat	Peningkatan efektivitas sistem perdagangan	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
			Pengembangan industri hasil unggulan daerah	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
				Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Penataan Struktur Industri
2	Meningkatnya investasi daerah dalam rangka mengurangi pengangguran	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Peningkatan kompetensi Angkatan kerja potensial	Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktifitas Program Peningkatan Kesempatan Kerja
			Peningkatan ketrampilan hidup wirausaha muda	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif
			Peningkatan iklim dan promosi investasi serta pembangunan kemitraan dengan dunia usaha	Program Pengendalian Pelaksanaan Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Sumber: RPJMD 2019-2024

Permasalahan dalam pembinaan IKM di Kabupaten Gunung Mas adalah pembinaan pengusaha/perajin IKM masih belum maksimal dan belum menyentuh secara keseluruhan ke jenis/cabang industri binaan karena

terbatasnya dana yang tersedia dan SDM pada bidang IKM yang masih kurang/terbatas.

4. Konsultasi Industri

Konsultasi/Koordinasi khususnya di bidang IKM pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas dianggarkan, diprogramkan, dan dilaksanakan secara berkala setiap tahun anggaran. Kendala dalam pengambilan kebijakan Pembinaan kepada para pelaku usaha sulit dilaksanakan secara optimal akibat kurangnya kesadaran para pelaku usaha untuk memberikan informasi, data, dan laporan mengenai perkembangan usahanya, yang merupakan dasar dilakukannya evaluasi oleh Pemerintah pada setiap kegiatan konsultasi.

B. Sumber Daya Alam

Sektor industri merupakan sektor hilir dimana pengusahaannya tergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Sebagai sektor hilir, produk industri erat kaitannya dengan produk unggulan daerah. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah merupakan salah satu syarat suatu komoditi dapat menjadi produk industri dan produk unggulan daerah (Sandriana et al. 2015). Ketersediaan sumber daya alam yang potensial untuk dijadikan input industri ditentukan dari perbandingan besaran produksi antar komoditas. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas, potensi IKM yang terkait dengan penggunaan sumber daya per Kecamatan ditinjau dari jumlah usaha yang dominan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2.14.

Tabel 2. 14. Jumlah Industri Berbasis Pemanfaatan Sumber Daya Alam Langsung per Kecamatan

Jumlah per Kecamatan	KBLI					
	31001 (A)	16221 (B)	31002 (C)	16291 (D)	16293 (E)	16294 (F)
Manuhing	1	3	-	-	-	-
Manuhing Raya	-	1	-	-	-	-
Rungan	-	2	-	-	-	-
Rungan Hulu	-	1	-	3	-	-

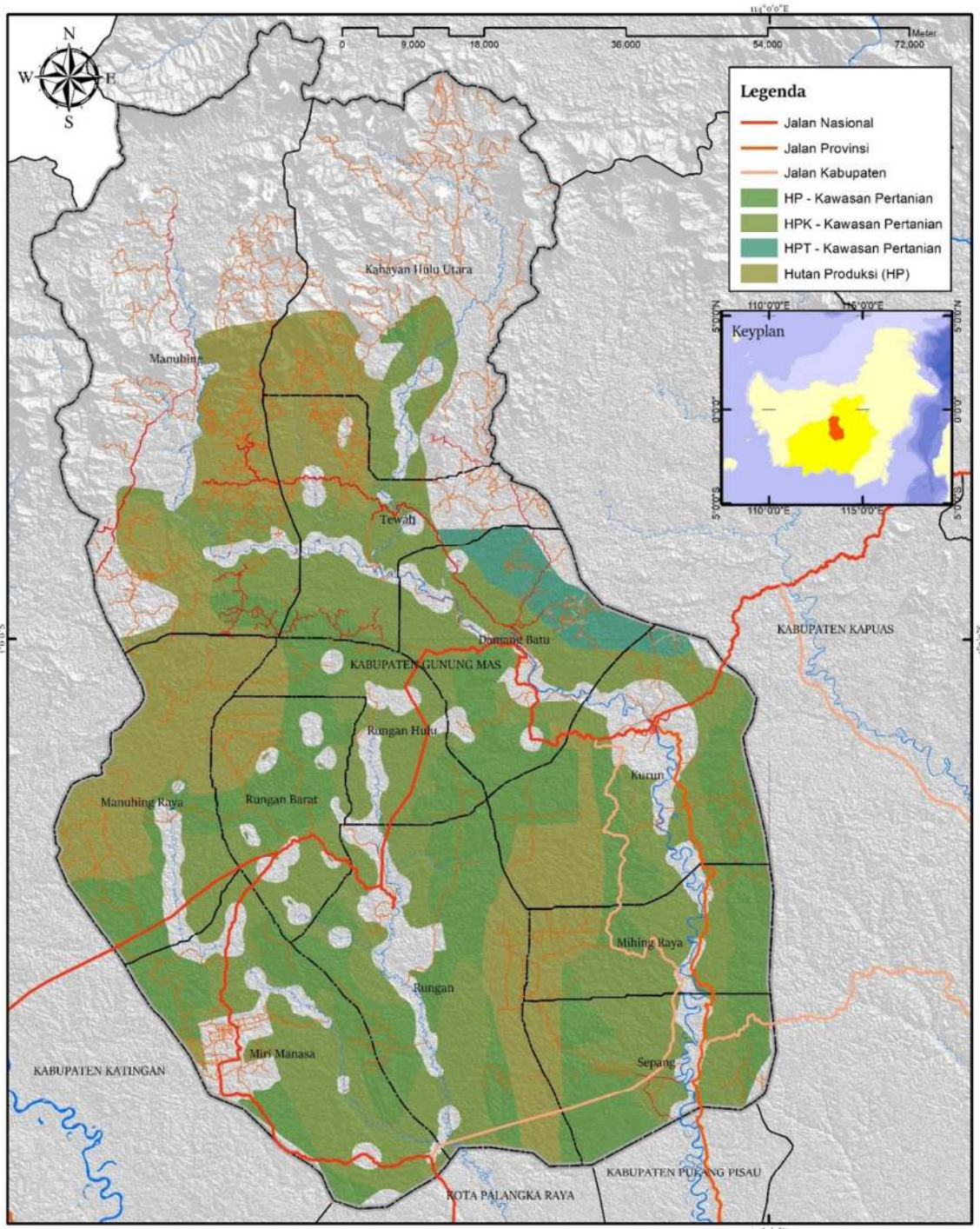
Jumlah per Kecamatan	KBLI					
	31001 (A)	16221 (B)	31002 (C)	16291 (D)	16293 (E)	16294 (F)
Rungan Barat	-	-	-	2	-	2
Sepang	-	2	-	-	2	-
Mihing Raya	4	3	-	7	-	-
Kurun	-	14	-	5	1	-
Tewah	-	4	-	3	-	-
Kahayan Hulu Utara	3	3	-	2	1	-
Damang Batu	3	1	1	-	-	-
Miri Manasa	3	1	1	-	-	-
Total	14	35	2	22	4	2
A. Industri furniture dari kayu B. Industri barang bangunan dari kayu C. Industri furniture dari rotan dan atau bambu D. Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu E. Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller F. Industri Alat Daput dari Kayu, Rotan, dan Bambu						

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka. 2018, Hasil Survey 2018

Komoditi hasil hutan menjadi salah satu input utama yang banyak diusahakan masyarakat pada sektor industri. Hal ini ditunjang oleh ketersediaan bahan baku yang memadai. Keberadaan perusahaan besar kayu di Kabupaten Gunung Mas menjadi pemasok utama bahan baku kayu untuk kebutuhan industri kecil dan menengah. Kayu-kayu yang digunakan oleh masyarakat merupakan kayu sisa dari hasil produksi perusahaan. Peruntukan lahan hutan di Kabupaten Gunung Mas juga cukup signifikan untuk menunjang keberlanjutan industri berbasis komoditi hasil hutan. Areal peruntukan hutan dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.15.

Tabel 2.15. Potensi Sumber Daya Komoditi Hasil Hutan

No	Peruntukan	Luas (Ha)
1	Hutan Produksi – Kawasan Pertanian	178.913
2	Hutan Produksi Konversi – Kawasan Pertanian	233.900
3	Hutan Produksi Terbatas – Kawasan Pertanian	18.203
4	Hutan Produksi	158.460



Gambar 2.2 Peruntukan Hutan Kabupaten Gunung Mas

C. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri pengolahan hasil hutan menjadi barang jadi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Hal tersebut telah terlihat khususnya pada kawasan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) di Kecamatan Sepang dimana teknologi pengolahan bahan baku, pengolahan barang setengah jadi, hingga peralatan finishing telah tersedia. Walaupun pembangunan kawasan masih dalam proses, namun kegiatan industri telah berjalan dan peralatan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

D. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi.

Kegiatan peningkatan kreativitas dan inovasi produk telah berjalan di Kabupaten Gunung Mas dan dilaksanakan untuk masyarakat oleh lintas SOPD khususnya yang membidangi pengembangan produk-produk UMKM dan IKM. Belum terdapat wadah atau balai sentra pelatihan yang secara khusus melaksanakan peningkatan kreativitas dan inovasi secara terpusat di Kabupaten Gunung Mas.

E. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan terkait IKM khususnya yang memiliki manfaat langsung pada pengembangan IKM masih belum terdata. Provinsi Kalimantan Tengah melalui Universitas Palangka Raya (UPR) membuka seluas-luasnya kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten-Kota untuk dapat bekerja sama dalam penelitian dan pengembangan terkait sektor industri. Kerjasama penelitian dan pengembangan sendiri secara umum telah terselenggara dengan didasarkan pada *Memorandum Of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dengan Universitas Palangka Raya (UPR), hal ini ditandai oleh telah dilaksanakannya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa UPR di wilayah Kabupaten Gunung Mas setiap tahun.

F. Permodalan

Permodalan untuk menunjang kegiatan IKM masyarakat Kabupaten Gunung Mas masih mengandalkan koperasi dan perbankan, namun masih dilakukan secara individual dan parsial. Belum terdapat inisiasi permodalan yang melibatkan gabungan kelompok usaha untuk menunjang kegiatan industri skala besar. Selain murni berasal dari koperasi dan perbankan, masih ada beberapa pelaku usaha yang

menikmati program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Kedepannya diarahkan permodalan dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang industri dapat disokong oleh pemerintah desa melalui dana penyertaan pengembangan ekonomi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2.3.4 SARANA DAN PRASARANA

A. Pengolahan lingkungan

Pengolahan lingkungan terkait perwujudan kawasan industri yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunung Mas meliputi:

1. Pemetaan zona industri yang telah ada dan kawasan pengembangannya;
2. Pembangunan kelengkapan dan cakupan layanan sarana prasarana pendukung untuk kebutuhan kawasan industri dimasa depan;
3. Pencadangan kawasan industri baru;
4. Pencadangan pengadaan perumahan bagi karyawan industri;

B. Kawasan Peruntukan industri

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri, Kawasan Industri atau Kawasan Sentra IKM dibangun pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku. Berdasarkan RTRW Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2034, telah ditetapkan KPI sebagai bagian dari Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gunung Mas ini diarahkan di Kecamatan Kurun dengan luas 254,61 Ha (Gambar 2.4). Salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya hal tersebut antara lain adalah dengan pengoptimalisasian fungsi jalan koridor Kuala Kurun – Palangka Raya serta peningkatan fungsi Bandara untuk kegiatan pemasaran barang hasil produksi.

C. Infrastruktur dan fasilitas kelistrikan dan Energi

Kebutuhan dan penyediaan listrik di Kabupaten Gunung Mas dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Penyediaan listrik ditunjang infrastruktur Kelistrikan Kabupaten Gunung Mas berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Penyediaan listrik eksisting Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat

pada Tabel 2.16. Proyeksi penyediaan listrik di Kabupaten Gunung Mas khusus untuk kegiatan industri kecil dan menengah adalah termasuk dari alokasi listrik rumah tangga yaitu 450 volt per orang (SNI 1733-2004), namun melihat dari kenaikan besaran listrik yang dipakai sendiri oleh PLN, maka nilai besaran kebutuhan yang menjadi dasar proyeksi akan berbeda dari standar SNI tersebut. Proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Gunung Mas periode 2019-2039 berdasarkan standar dan berdasarkan pemakaian eksisting dapat dilihat pada Tabel 2.17.

Tabel 2. 16. Penyediaan listrik Kabupaten Gunung Mas (Volt)

Tahun	Produksi	Dijual	Dipakai Sendiri	Susut
2013	19.458.942	18.740.831	37.989	680.122
2014	24.813.659	22.609.305	-	2.204.354
2015	26.347.729	24.099.137	85.355	2.163.237
2016	29.877.041	26.877.651	151.570	3.148.967
2017	30.688.202	27.857.551	60.313	2.967.328

Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka. 2018

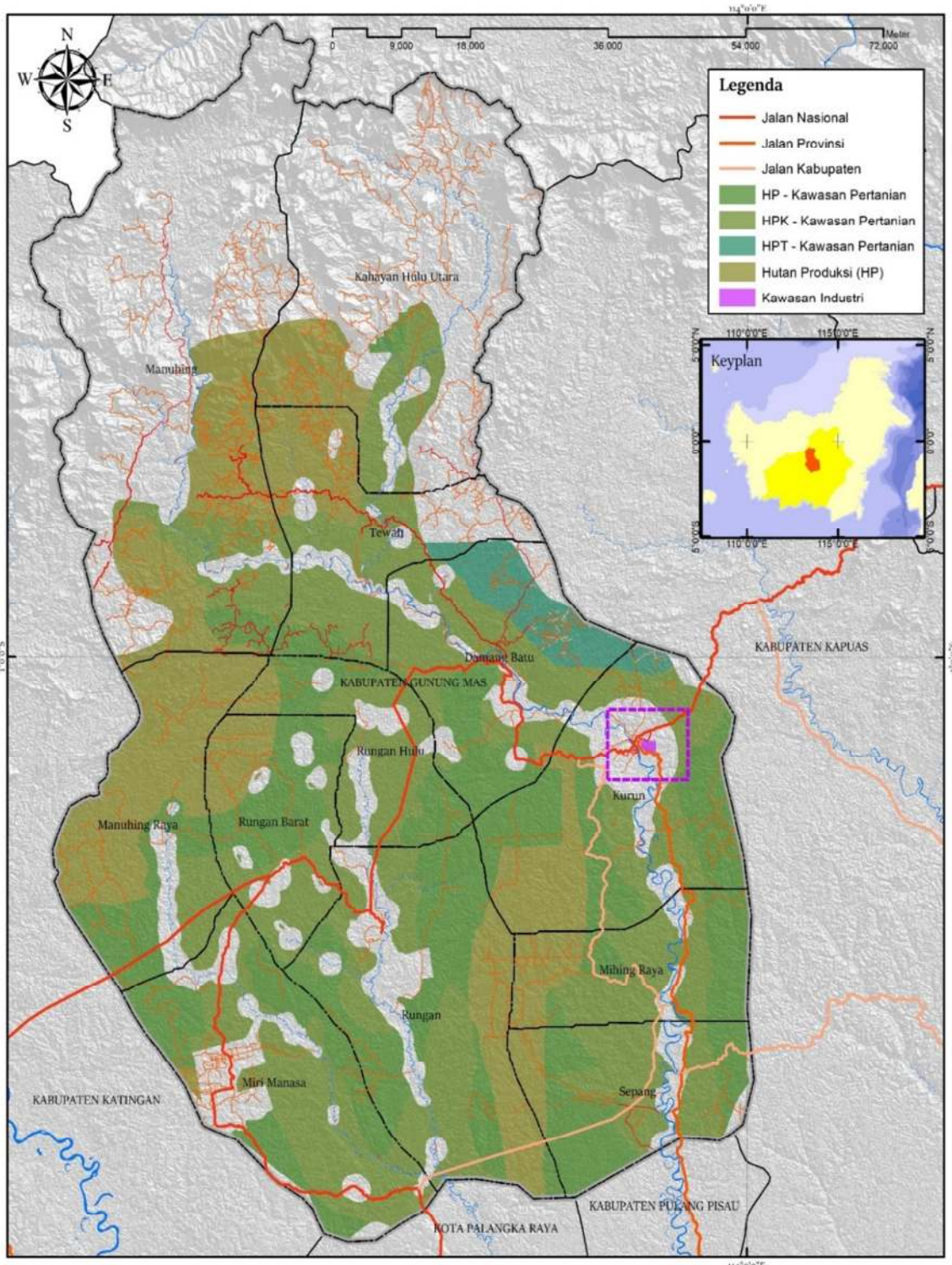
Tabel 2. 17. Proyeksi Kebutuhan listrik Kabupaten Gunung Mas (Volt)

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Listrik berdasarkan SNI (Volt)	Proyeksi Kebutuhan Listrik berdasarkan Pemakaian (Volt)
2019	117.192	52.736.303	66.155
2024	128.491	57.821.173	105.030
2029	140.881	63.396.329	166.751
2034	154.465	69.509.046	264.741
2039	169.358	76.211.155	420.314

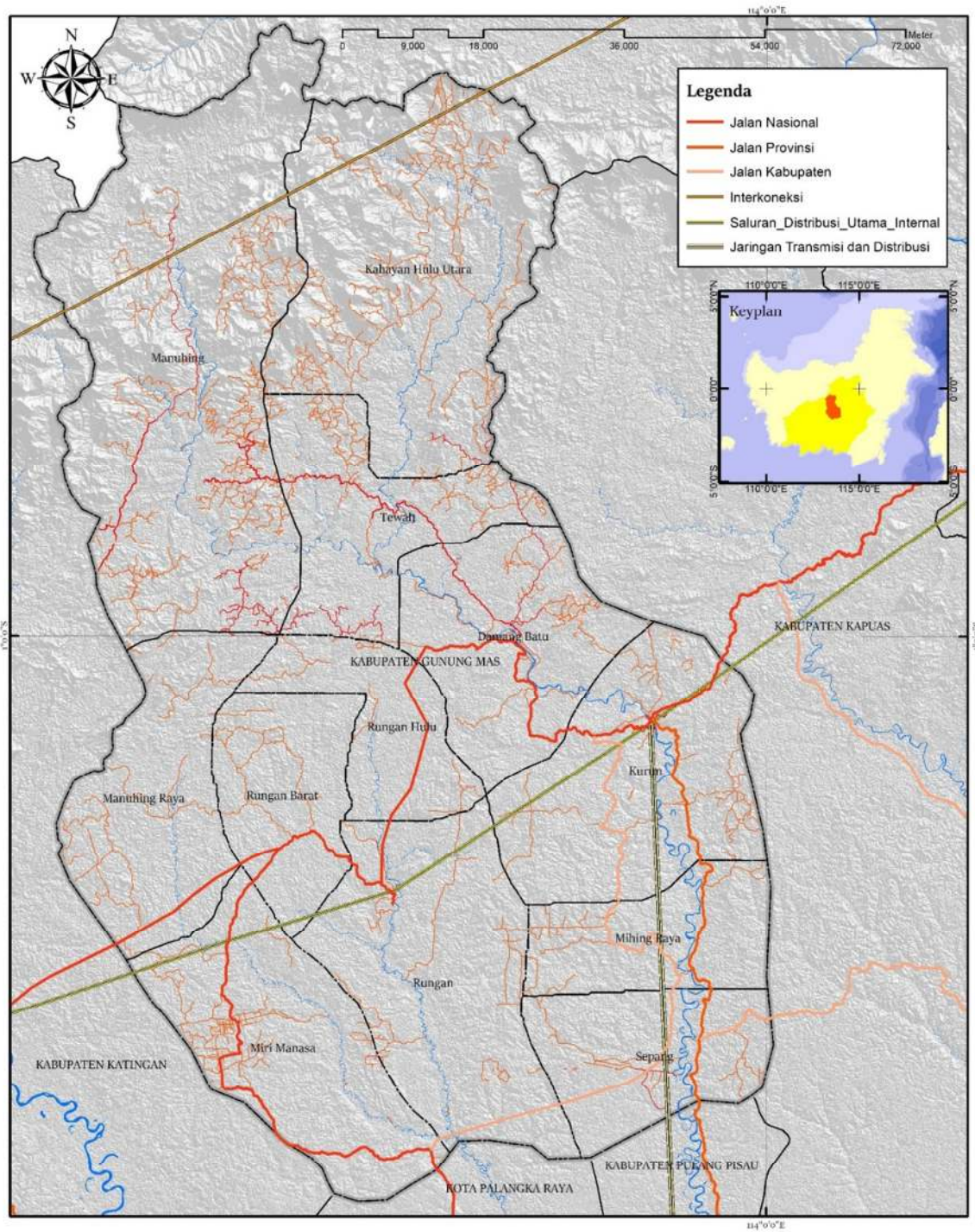
Sumber: Kabupaten Gunung Mas Dalam Angka. 2018

Infrastruktur kelistrikan yang tersedia di Kabupaten Gunung Mas berupa jaringan interkoneksi sebagai transmisi dan distribusi di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian utara, Jaringan Distribusi Utama Internal yang mendistribusikan listrik di wilayah Kabupaten Gunung Mas bagian tengah dan selatan, dan Jaringan Transmisi-Distribusi Provinsi di yang menghubungkan jaringan listrik perkotaan Kuala Kurun dan Kota Palangka Raya. sebaran jaringan infrastruktur kelistrikan dan energi Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada Gambar 2.4.

Selain penyediaan listrik melalui jaringan transmisi dan distribusi provinsi, di wilayah Kabupaten Gunung Mas saat ini telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x100 MW. PLTU tersebut terletak di Kecamatan Rungan, telah mulai dibangun pada tahun 2017 dan saat ini pada proses finishing untuk segera operasional. Keberadaan PLTU tersebut akan menambah kapasitas penyediaan listrik di Kabupaten Gunung Mas khususnya untuk menunjang perkembangan sektor industri kedepannya.



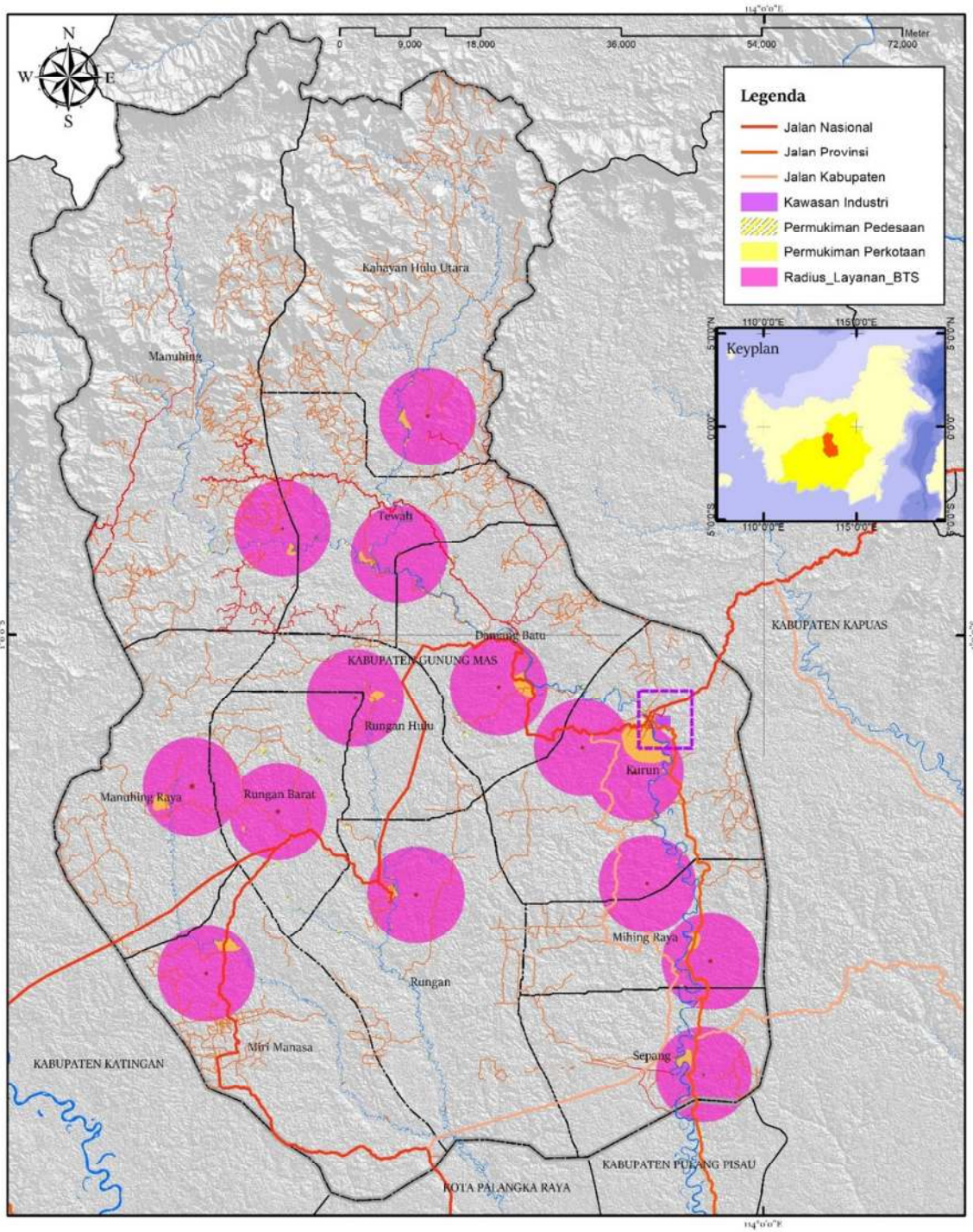
Gambar 2.3 Sebaran Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Gunung Mas
Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Tengah



Gambar 2.4 Jaringan Infrastruktur Kelistrikan Kabupaten Gunung Mas
Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Tengah

D. Fasilitas Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi eksisting Kabupaten Gunung Mas terdiri atas: Sistem jaringan kabel; Sistem jaringan nirkabel; dan Sistem jaringan satelit. Sistem jaringan kabel adalah jaringan kabel fiber optik underground khususnya pada area perkotaan Kuala Kurun. Sistem jaringan nirkabel adalah jaringan komunikasi yang dikelola oleh swasta dan/atau Badan Usaha Milik Negara dengan lokasi tersebar di setiap Kecamatan. Sistem jaringan satelit adalah jaringan komunikasi yang dikelola oleh swasta. Sistem jaringan nirkabel dan sistem jaringan satelit saat ini telah ditunjang oleh keberadaan *Base Transceiver Station* (BTS) berjumlah 14 buah tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Keberadaan BTS saat ini telah memenuhi kebutuhan telekomunikasi masyarakat yang tinggal di permukiman perkotaan khususnya di setiap ibukota Kecamatan, namun sebagian konsentrasi permukiman-permukiman pedesaan yang letaknya tersebar serta Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang terletak di kurun seberang, saat ini belum masuk dalam radius pelayanan BTS (6-7 Km). Sebaran dan radius pelayanan BTS dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar 2.5 Lokasi dan Radius Pelayanan BTS
Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Hasil Analisis

E. Fasilitas Jaringan Sumber Daya Air

Sumber air bersih utama di Kabupaten Gunung Mas berasal dari air sungai dan sumur bor. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bahalap merupakan perusahaan utama yang memasok kebutuhan air minum. Kapasitas produksi air bersih berdasarkan lokasi unit di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada Tabel 2.18. Statistik pelanggan air bersih dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.18. Kapasitas Produksi Air bersih

Unit	Kapasitas Produksi (L/d)		Sumber
	Potensi	Efektif	
Kuala Kurun	40	33	Sungai Kahayan
Unit IKK Tewah	15	10	Sungai Kahayan
Unit IKK Sepang Simin	13	10	Sungai Kahayan
Unit IKK Tbg. Jutuh	3	-	Sungai Rungan
Unit IKK Tbg. Talaken	7	5	Sungai Manuhing
Unit IKK Tumbang Miri	10	7	Sungai Miri
Unit Desa Sepang Kota	5	-	Sumur Bor
Unit IKK Kampuri	10	7	Sungai Kahayan

Sumber: KDA Gunung Mas. 2018

Tabel 2.19. Statistik Pelanggan Air bersih

Kategori Pelanggan	Jumlah (Sambungan)	Jumlah (m ³)	Nilai (Juta Rupiah)
1. Sosial			
- Umum	13	2809	9
- Khusus	36	14049	78
2. Non Niaga			
- Rumah Tangga A	2687	379807	2160
- Rumah Tangga B	1698	253131	1731
- Rumah Tangga C	14	3014	28
- Instansi Pemerintah	140	27704	430
3. Niaga			
- Kecil	52	10472	159
- Besar	9	6514	158
4. Industri			
- Kecil	-	-	-
- Besar	-	-	-
5. Khusus			
- Pelabuhan	-	-	-
- Lainnya	-	-	-
6. Susut/Hilang			
	-	-	-

Sumber: KDA Gunung Mas. 2018

Berdasarkan data, penggunaan air bersih oleh industri kecil dan menengah belum terdokumentasikan. Melihat kecenderungan IKM di Kabupaten Gunung Mas yang berbasis pada usaha rumahan, maka proyeksi kebutuhan air bersih dapat dilakukan berdasarkan standar kebutuhan air bersih rumah tangga yaitu 30 Liter/orang/hari. Proyeksi kebutuhan air bersih rumah tangga yang mengakomodir kebutuhan IKM dapat dilihat pada Tabel 2.20.

Tabel 2. 20. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk (Jiwa)	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih berdasarkan SNI (Liter)	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih berdasarkan SNI (Liter)
2019	117.192	3.515.760	3516
2024	128.491	3.854.730	3855
2029	140.881	4.226.430	4226
2034	154.465	4.633.950	4634
2039	169.358	5.080.740	5081

Sumber: Hasil Analisa

F. Fasilitas Sanitasi

Berdasarkan RTRW Kabupaten Gunung Mas 2014-2034, Peningkatan dan pembangunan saluran drainase disertai dengan upaya pengawasan terhadap pembangunan dan pemanfaatan lahan di sekitar saluran pematusan, serta upaya untuk pemeliharaan dan menjaga kebersihan saluran; Pengelolaan air limbah di Kabupaten Gunung Mas terdiri dari dua sistem yaitu On-Site System dan Off-Site System dengan kriteria sebagai berikut:

1. *On-Site System*, dimana buangan langsung dialirkan ke septic tank dan cairannya diresapkan melalui tanah.
2. *Off-Site System*, dimana menggunakan sistem saluran air buangan untuk mengalirkan air buangan dari rumah tangga kemudian diolah disuatu tempat tertentu.

Pengembangan prasarana pengolahan limbah domestik dilakukan melalui :

1. Pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal di Kecamatan yang memiliki kemudahan akses akan tetapi jauh dari permukiman;
2. Pengembangan sistem pengolahan limbah domestik terpadu untuk kawasan perkotaan; dan
3. Pengembangan septik tank individual.

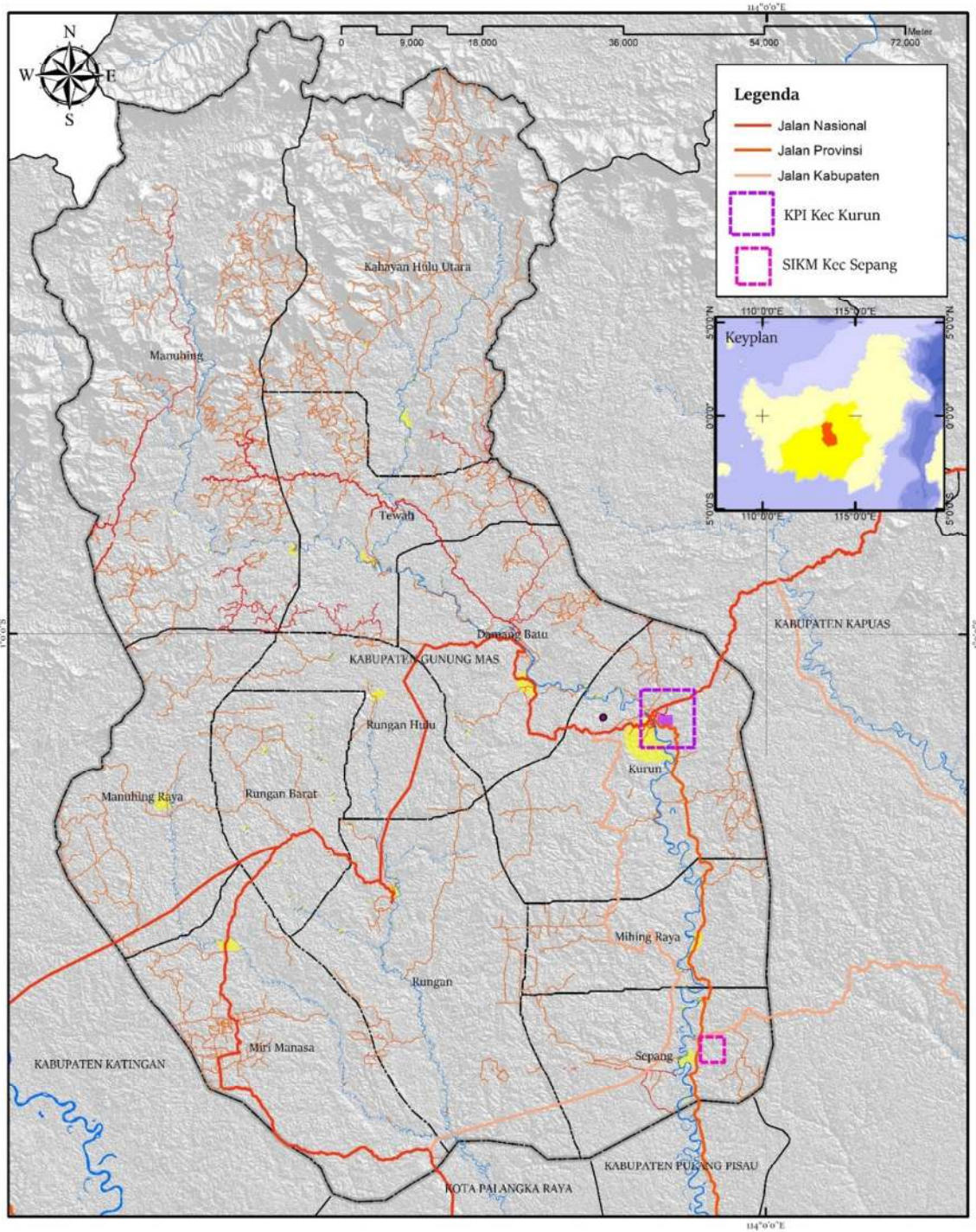
Rencana pengembangan sistem pengolahan limbah, terdiri atas:

1. Kawasan permukiman menggunakan *septic tank* dan peresapan dengan memperhatikan desain peresapan; dan
2. Sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan fasilitas umum.

Untuk mewujudkan arahan tersebut, maka rencana 5 tahun kedepan melalui RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2019-2024 yaitu pelaksanaan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan jaringandrainase khususnya pada area permukiman perkotaan. Secara eksisting belum terdapat IPAL komunal perkotaan di Kabupaten Gunung Mas, kecuali IPAL untuk menunjang PLTU. TPA yang saat ini telah operasional adalah TPA di Km-12 jalan Kuala Kurun-Tewah untuk pelayanan kebutuhan persampahan perkotaan Kabupaten. Sedangkan jaringan adalah jaringan drainase perkotaan Kuala Kurun. Untuk kebutuhan industri diperlukan pembangunan pengolahan sampah mandiri, IPAL kawasan, dan sistem jaringan drainase khususnya pada kawasan Sentra IKM (SIKM) dan calon Kawasan Industri (KI).

G. Infrastruktur Transportasi

Kawasan pusat-pusat permukiman, Kawasan Peruntukan Industri (KPI), dan eksisting SIKM Kabupaten Gunung Mas telah terlayani oleh jaringan jalan. Walaupun pada beberapa segmen masih belum dilayani jembatan sehingga penyebrangan menggunakan kapal ferry sungai masih lazim digunakan. KPI di Kecamatan Kuala Kurun dan SIKM di Kecamatan Sepang saat ini berlokasi sangat strategis yaitu berada di pinggir jalan lintas Provinsi sehingga aksesibilitas dari dan menuju kedua kawasan tersebut telah terlayani dengan baik (Gambar 2.6).



Gambar 2.6 Lokasi KI dan SIKM terhadap Infrastruktur Jalan Kabupaten Gunung Mas
Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, Hasil Survey

H. Pergudangan Industri

Penyimpanan dan pemrosesan bahan baku dan hasil produksi usaha industri kecil dan menengah belum dilaksanakan secara berkelompok, sebagian besar secara individual dan parsial oleh masing-masing pengusaha. Pemrosesan dan penyimpanan bahan baku serta hasil produksi IKM yang dikelola pemerintah khususnya produk industri kayu di SIKM Kecamatan Sepang dilaksanakan di area tersebut, dimana pemerintah telah menyediakan ruang penyimpanan bahan, ruang penyimpanan produk setengah jadi, dan ruang display produk jadi (Gambar 2.9).



Gambar 2.7 Penyimpanan dan Pemrosesan
Sumber: Hasil Survey. 2019

2.3.5 PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

A. Sentra IKM Eksisting

IKM Kabupaten Gunung Mas saat ini didominasi oleh usaha industri rumahan skala kecil dan menengah pada sub sektor industri makanan yaitu 123 unit usaha dan sub sektor industri bahan bangunan dari kayu sebanyak 80 unit usaha. Sebagian besar dilaksanakan tersebar di seluruh kecamatan memanfaatkan lokasi usaha dirumah dan atau berdekatan dengan tempat tinggal. Satu-satunya SIKM yang saat ini

beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah adalah SIKM bahan bangunan dan furniture dari kayu di Kecamatan Sepang. Lokasi SIKM sangat strategis sesuai dengan standar lokasi SIKM berdasarkan Kriteria kawasan industri Permenperin Nomor 40 tahun 2016. Pada Kawasan tersebut telah ada fasilitas ruang produksi untuk pemrosesan dari bahan baku hingga bahan jadi, peralatan, pergudangan, asrama bagi pengelola dan pengguna kawasan, kantor, dan ruang display (Gambar 2.10)



Gambar 2.8 SIKM di Kecamatan Sepang
Sumber: Hasil Survey. 2019

B. UPT Eksisting

SIKM di Kecamatan Sepang diarahkan sebagai UPT Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas bila telah operasional secara penuh. Telah tersedia kantor di area depan kawasan SIKM yang dapat dimanfaatkan sebagai kantor operasional dan pelayanan, serta untuk tujuan display produk bagi tamu yang datang. Saat ini penganggaran pembangunan dan pengembangan dilaksanakan

secara penuh setiap tahun oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gunung Mas.

C. Pusat Promosi Pengembangan IKM

Pada saat ini pusat promosi produk-produk IKM dari produk kerajinan dan makanan Kabupaten Gunung Mas memanfaatkan kegiatan dan program dekranasda Kabupaten. Selain itu SIKM Kecamatan Sepang juga menyediakan ruang promosi namun khusus bagi produk-produk bahan bangunan dan furniture dari kayu.

BAB III

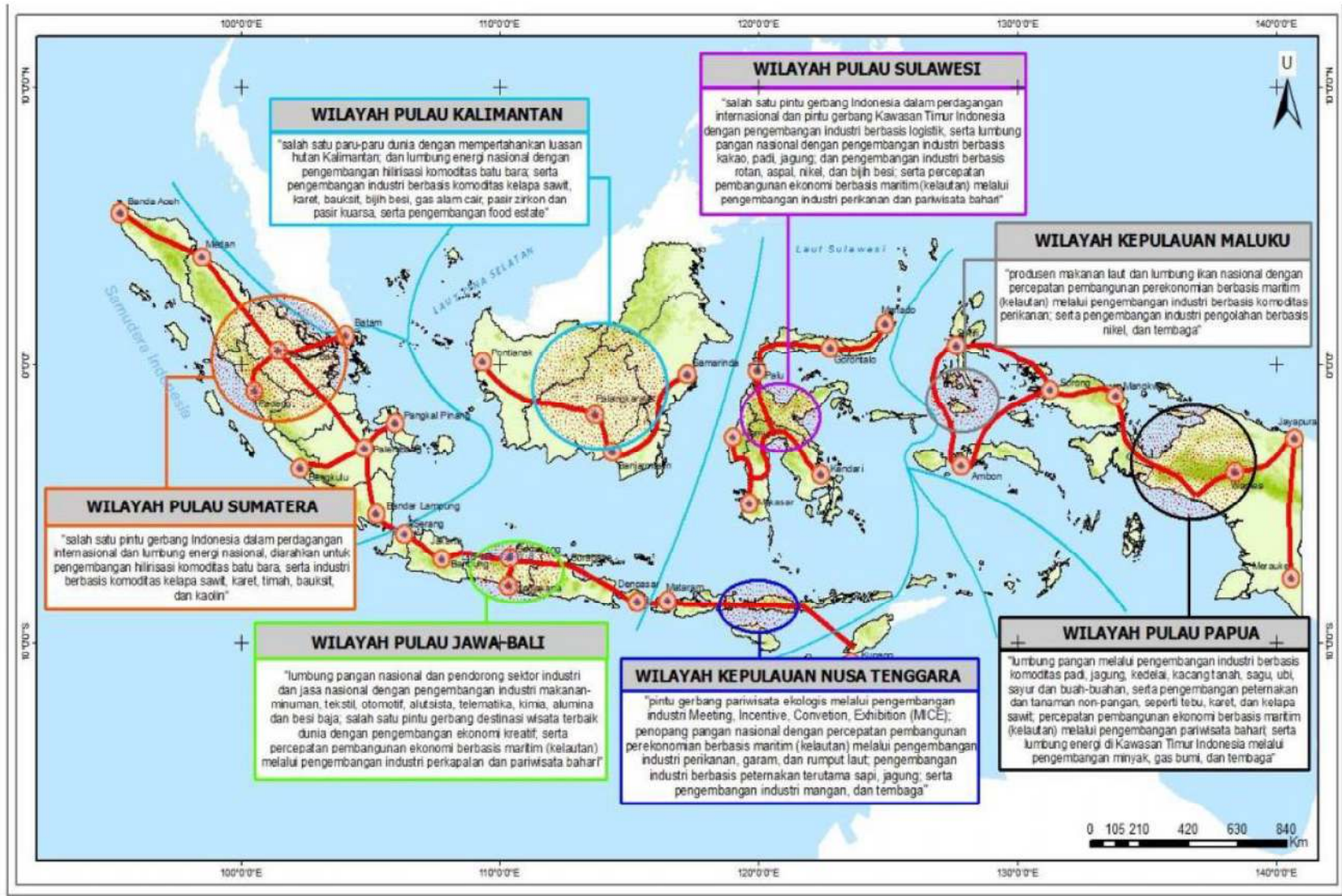
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN TERKAIT

3.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Perumusan visi pembangunan industri daerah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek vertikal, yaitu dengan mekanisme perumusan berdasarkan visi pembangunan ditingkat nasional, provinsi, dan daerah. Proses perumusan visi dan misi pembangunan industri dapat dilihat pada Tabel 3.1. Selain berdasarkan mekanisme perumusan secara vertikal, perumusan visi didasarkan pula pada isu-isu strategis. Isu strategis terkait pengembangan industri yang telah dijabarkan pada RPJMD Kabupaten Gunung Mas 2019-2024 yaitu dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 1 Visi Pembangunan terkait Sektor Industri

KEBIJAKAN NASIONAL		
Visi RPJMN 2015-2019	Visi RIPIN 2015-2035	Visi Renstra Kemenperin 2015-2019
<i>Mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur</i>	<i>Menjadi Negara Industri Tangguh. Bercirikan struktur industri nasional yang kuat, dalam, sehat, dan berkeadilan; industri yang berdaya saing tinggi di tingkat global; dan industri yang berbasis inovasi dan teknologi.</i>	Memantapkan Daya Saing Basis Industri Manufaktur yang Berkelanjutan serta Terbangunnya Pilar Industri Andalan Masa Depan dengan fokus prioritas pembangunan industri peningkatan jumlah usaha, peningkatan produktivitas usaha, serta peningkatan integrasi usaha
KEBIJAKAN PROVINSI		
Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah	Visi RPIP Kalimantan Tengah 2017-2037	Visi Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2016-2021
Kalimantan Tengah Maju, Mandiri & Adil untuk Kesejahteraan Sege nap Masyarakat Menuju Kalimantan Tengah BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)	“Pada 2037 Sektor Industri Provinsi Kalimantan Tengah Unggul di tingkat Regional Kalimantan, berbasis Diversitas Produk Lokal dan Berkelanjutan”.	Meningkatkan Inovasi Sektor Perdagangan Dan Industri Untuk Menggerakkan Dan Memfasilitasi Kegiatan Pembangunan Ekonomi Rakyat Yang Saling Bersinergi Dan Berkelanjutan Menuju Kalimantan Tengah “Berkah”



Gambar 3. 1 Tema Pengembangan Wilayah Indonesia 2015-2019
 Sumber: RPJMN 2015-2019

A. Permenperin Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

Pembangunan kawasan industri meliputi tiga tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan terdiri atas pemilihan lokasi kawasan industri, penyusunan dokumen, serta pengurusan perizinan. Pemilihan lokasi didasarkan pada studi kelayakan yang mencakup indikator-indikator teknis yang harus terpenuhi agar suatu lokasi dianggap layak menjadi kawasan industri atau sentra IKM. Kriteria kawasan industri berdasarkan Permenperin Nomor 40/M-Ind/Per/6/2016 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Kriteria Kawasan Industri dan Sentra IKM

No	Kriteria	Keterangan
1	Jarak dengan Pusat Kota	Minimal 10 Km
2	Jarak dengan Permukiman	Minimal 2 Km
3	Jaringan Transportasi Darat	Tersedia atau dekat dengan arteri Primer atau Jaringan Kereta Api
4	Jaringan Infrastruktur	Tersedia atau dekat Jaringan Energi dan Telekomunikasi, Sumber Air Permukaan (Sungai, Danau, Waduk) dengan Debit Cukup
5	Jaringan Transportasi Air	Tersedia/Dekat Dengan Pelabuhan Laut
6	Lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Topografi Maksimal 15 Persen • Daya dukung lahan pada range sigma 0,7-1,0 Kg/cm² • Kesuburan tanah minimal dan non-irigasi teknis • Harga lahan relatif rendah • Berada Dalam Kawasan Peruntukan Industri • Luas Minimal 50 Ha (termasuk didalamnya minimal 5 Ha untuk kawasan IKM)

Sumber: Permenperin Nomor 40/M-Ind/Per/6/2016

Pembangunan kawasan industri dilengkapi dengan dokumen Rencana Induk (Master Plan), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

- Rencana Induk (*Master Plan*)
Muatan dan bahasan yaitu:
 - Target jenis industri
 - Analisa dan Penataan Pola Ruang serta *Site Plan*
 - Perencanaan Infrastruktur
 - Strategi Pembangunan Kawasan Industri dan Analisa Finansial
 - Sistem Manajemen Kawasan Industri
- AMDAL (mengacu Permen Lingkungan Hidup No. 16 tahun 2012)

Muatan dan bahasan yaitu:

- Kerangka Acuan Analisa Dampak Lingkungan Hidup (KA-Andal)
- Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Andal)
- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)
- Ringkasan Eksekutif

▪ ANDALALIN

Muatan dan bahasan yaitu:

- Gambaran umum lokasi
- Analisa bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan
- Simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan
- Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak serta tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak
- RPL dan RKL

Penyusunan dokumen pendukung dapat dilakukan bersamaan dengan proses pembebasan lahan pada tahap pembangunan.

Berdasarkan PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, Perizinan terkait pembangunan kawasan industri meliputi:

- Izin prinsip (dilampiri analisa kelayakan lokasi)
- Izin Lingkungan (dilampiri AMDAL dan ANDALALIN)
- Izin Lokasi
- Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
- Hak Guna Bangunan (HGB), dilakukan bertahap yaitu HGB keseluruhan kawasan, kemudian HGB masing-masing kaveling industri
- Izin Perluasan Kawasan Industri, dilakukan setelah mendapat IUKI dan kawasan industri telah beroperasi dan kemudian membutuhkan perluasan

2. Tahap Pembangunan

Tahap pembangunan meliputi kegiatan pembebasan lahan dan penyusunan *Detail Engineering Design* (DED) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.

▪ Pembebasan Lahan

Proses pembebasan lahan yang perlu dilakukan yaitu:

- Sosialisasi pembebasan kepada masyarakat dan pemilik lahan
- Pengukuran dan pemetaan detail persil lahan
- Kesepakatan dan pembayaran harga lahan

▪ Penyusunan Perencanaan DED

Muatan DED meliputi Gambar Teknis, *Bill of Quantity*, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB), serta Rencana Kerja dan Syarat (RKS). Kemudian jenis pekerjaan yang dilakukan dalam penyusunan DED kawasan industri yaitu:

- Pematangan lahan
- Desain jaringan jalan
- Perencanaan sistem jaringan air
- Perencanaan Sanitasi luar gedung (Sistem limbah, Drainase, Sampah, B3)
- Perencanaan kelistrikan
- Perencanaan *Landscape*
- Detail kaveling dan bangunan
- Perancangan sarana penunjang

3. Tahap Pengelolaan

Tahap pengelolaan meliputi Kelembagaan kawasan industri, Sistem manajemen, Estate Regulation, Pelayanan kepada tenan, Pemasaran, Pengembangan usaha, Pengelolaan lingkungan, Kepedulian sosial dan pemberdayaan masyarakat, Penyusunan dan pelaporan data kawasan industri.

B. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)

Dalam rangka pemerataan pembangunan industri nasional serta memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah, maka secara administratif wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan Industri (WPI). WPI ditentukan berdasarkan

keterkaitan ke belakang (*backward*) dan keterkaitan ke depan (*forward*) sumberdaya dan fasilitas pendukungnya, serta memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pembangunan industri. Kemudian pada setiap WPI terdapat Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi dalam WPI. WPPI disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- A. potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas);
- B. ketersediaan infrastruktur transportasi;
- C. kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa;
- D. penguatan dan pendalaman rantai nilai;
- E. kualitas dan kuantitas SDM;
- F. memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air);
- G. memiliki potensi sumber daya air industri;
- H. memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan
- I. kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

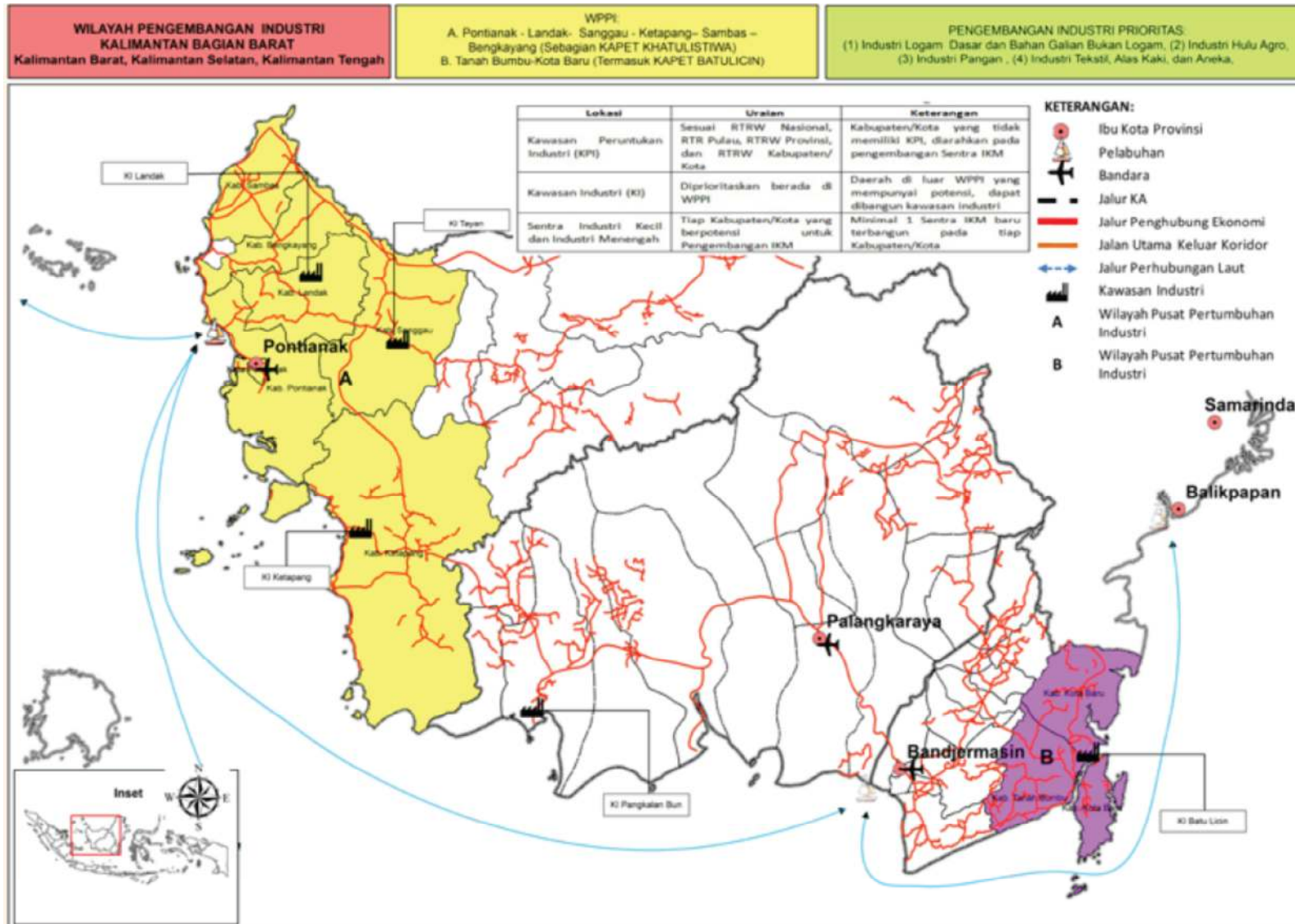
Disamping kriteria umum di atas, daerah yang sudah memiliki pusat-pusat pertumbuhan industri berupa kawasan industri dan yang mempunyai rencana pengembangan kawasan industri yang telah didukung oleh industri pendorong utama (anchor industry) dapat langsung ditetapkan sebagai WPPI. Rincian WPI dan WPPI selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.3. Berdasarkan RIPIN 2015-2035, Sektor Industri Provinsi Kalteng yang termasuk dalam WPI Kalimantan Bagian Barat yaitu: Industri Logam Dasar, Industri Hulu Agro, Industri Pangan, serta Industri Tekstil, Alas Kaki, dan Aneka. Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam WPI Kalimantan Bagian Barat, perwilayahan industri dan prioritas penanganan dapat dilihat pada Gambar 3.2.

Tabel 3. 3 WPI dan WPPI

No	WPI	Provinsi	WPPI
1	Papua	Papua	· Mimika
2	Papua Barat	Papua Barat	· Teluk Bintuni
3	Sulawesi Bagian Utara dan Maluku	Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sultra, Maluku, Malut	· Halmahera Timur-Halmahera Tengah - Pulau Morotai · Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa-Minahasa Utara (termasuk KAPET MANADO BITUNG) · Palu-Donggala-Parigi Mountong-Sigi (termasuk KAPET PALAPAS) · Kendari-Konawe-Konawe Utara-Konawe · Selatan-Kolaka-Morowali (termasuk KAPET

No	WPI	Provinsi	WPPI
			· BANK SEJAHTERA SULTRA)
4	Sulawesi Bagian Selatan	Sulbar, Sulsel	· Makassar-Maros-Gowa - Takalar-Jeneponto- · Bantaeng
5	Kalimantan Bagian Timur	Kaltara, Kaltim	· Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara · -Bontang-Kutai Timur (termasuk KAPET · SASAMBA) · Tarakan -Nunukan
6	Kalimantan Bagian Barat	Kalbar, Kalteng, Kalsel	· Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang · -Sambas-Bengkayang (sebagian KAPET · Khatulistiwa) · Tanah Bumbu-Kotabaru (termasuk KAPET · BATULICIN)
7	Bali dan Nusa Tenggara	Bali, NTB, NTT	· -
8	Sumatera Bagian Utara	NAD, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri	· Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie -Bireun- · Lhokseumawe (termasuk KAPET BANDAR · ACEH DARUSSALAM) · Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai - · Karo-Simalungun-Batubara · Dumai-Bengkalis-Siak · Batam-Bintan
9	Sumatera Bagian Selatan	Jambi, Bengkulu, Babel, Sumsel, Lampung	· Banyuasin -Muara Enim · Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung · Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan
10	Jawa	Banten, Jabar, DKI Jakarta, DI Jogjakarta, Jateng, Jatim	· Kendal-Semarang-Demak · Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo- · Mojokerto-Bangkalan · Cilegon-Serang-Tangerang · Cirebon-Indramayu-Majalengka · Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang

Sumber: RIPIN 2015-2035

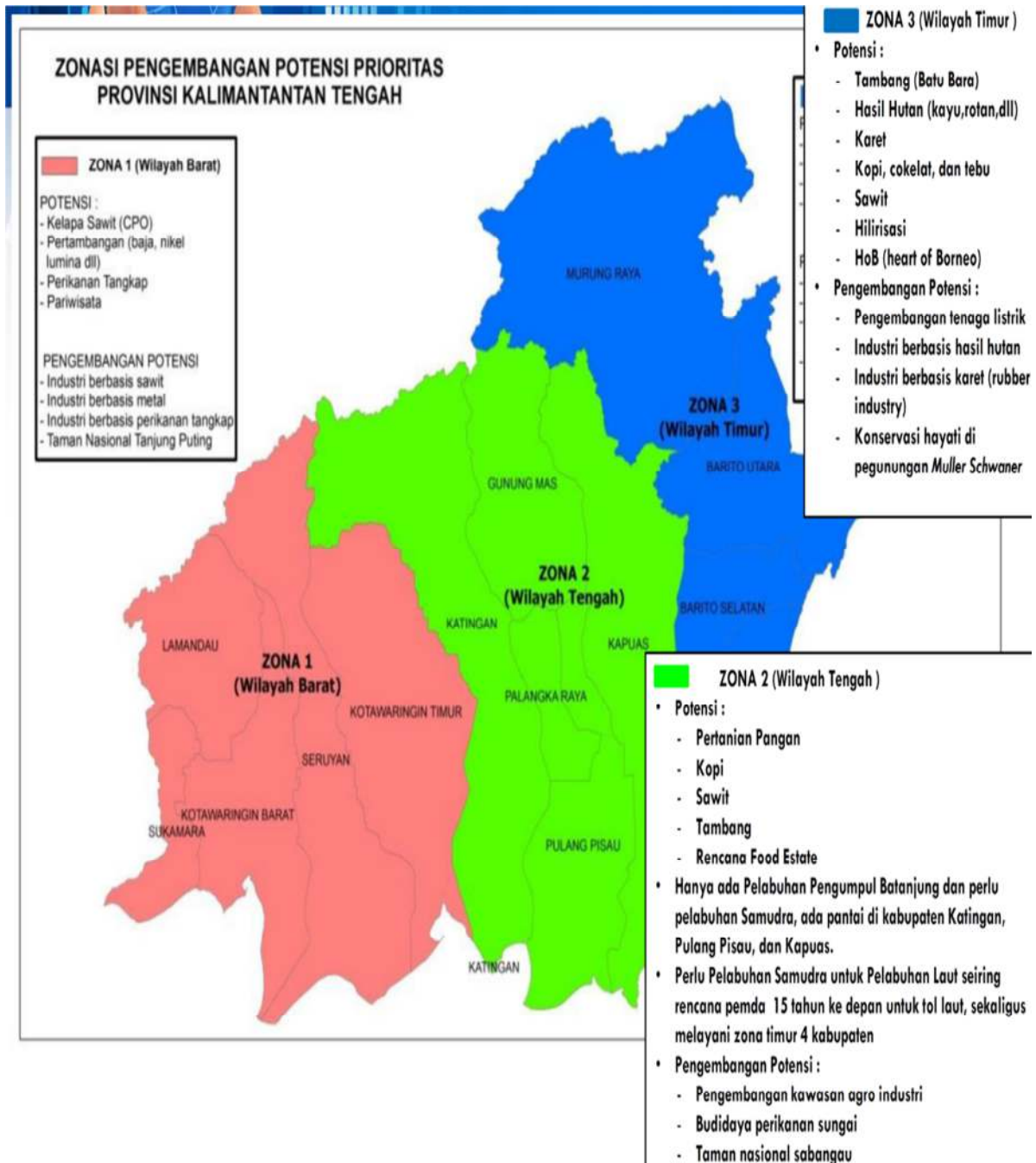


Gambar 3. 2 Perwilayahan industri dan prioritas penanganan WPI Kalimantan Bagian Barat

Sumber: RIPIN 2015-2035

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, ditetapkan arahan zonasi pengembangan potensi prioritas Provinsi Kalteng. Arahan yang berkaitan erat dengan pengembangan industri, wilayah Provinsi Kalteng dibagi atas 3 Zona yaitu Zona Wilayah Barat, Tengah, dan Timur dengan masing-masing potensi dan pengembangannya. Pembagian zonasi dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Tabel 3. 1 Zonasi Pengembangan Potensi Prioritas Provinsi Kalimantan Tengah

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2016-2021

D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Penataan ruang wilayah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034, bertujuan untuk terbukanya isolasi daerah menuju percepatan peningkatan kesejahteraan, kemandirian dan daya saing yang bermartabat untuk mewujudkan kabupaten gunung mas yang maju berbasis pertanian dan pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan..

Muatan-muatan yang berkaitan dengan pengembangan industri Kabupaten Gunung Mas yaitu:

- A. Kawasan peruntukan industri sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 huruf e, meliputi: kawasan peruntukan industri rumah tangga; dan kawasan peruntukan industri sedang dan besar. Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di setiap kecamatan. Kawasan peruntukan industri sedang dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kabupaten seluas kurang lebih 254,61 hektar berada di Kecamatan Kurun.;
- B. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, ditetapkan sebagai berikut: kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana pendukung fungsi kawasan perumahan, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri, kawasan pariwisata, ruang evakuasi bencana, dan ruang terbuka hijau
- C. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf i, ditetapkan sebagai berikut: kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan industri; kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan bersyarat yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang bukan kegiatan industri dengan syarat tidak mengganggu fungsi kawasan; dan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

NASKAH AKADEMIK RPIK GUNUNG MAS 2019-2039

4.1 Landasan Filosofis

Dalam alinea ke-IV (empat) Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan dari pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan kata lain berdasarkan Pancasila.

Pancasila merupakan dasar resmi kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila milik semua warga negara Indonesia yang tidak identik dengan rezim tertentu. Karena itu, setiap upaya revitalisasi Pancasila mencerminkan kegairahan untuk mencari kontekstualisasi prinsip-prinsip dasar kebangsaan. Disamping itu, Pancasila adalah kerangka didalam mana semua kelompok didalam masyarakat Indonesia melalui suatu proses dialog karya yang berkesinambungan, dimungkinkan untuk mencapai konsensus didalam menghadapi dan mengatasi masalah-masalah bersama yang secara historis dihadapi (Darmaputera. 1997).

Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi terluas kedua pada saat ini sedang giat-giatnya membangun untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang madani. Pembangunan dalam hal ini tidak terbatas hanya pada pembangunan fisik namun juga pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pembangunan tersebut tentunya berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah baik yang telah diambil maupun kebijakan yang akan dibuat seiring dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman. Setiap kebijakan inilah yang harus dapat diawasi bersama baik pemerintah daerah sendiri maupun masyarakat Kalimantan Tengah. Untuk

menjawantahkan kebijakan ini diperlukan suatu instrument yang menjadi pedoman atau pegangan bagi para penyelenggara pemerintahan daerah dimana instrument ini merupakan suatu politik hukum tertulis dan tertuang dalam suatu Produk Hukum Daerah. Produk Hukum inilah yang akan menjadi barometer terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan tujuan awal dari kebijakan tersebut yaitu kemanfaatan bagi masyarakat Kalimantan Tengah itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memenuhi tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan sila-sila yang termuat dalam Pancasila, maka diperlukan sebuah kebijakan daerah yang berorientasi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi geografi, demografi, dan corak daerah yang paling mampu meningkatkan kinerja ekonomi daerah sesuai dengan asas dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk menjawab tantangan peningkatan perekonomian daerah tersebut melalui sektor industri yang berkesesuaian dengan amanat Undang-Undang dan Kebijakan Nasional, serta mencapai pembangunan sektor industri yang terarah dan efektif untuk menunjang pembangunan sektor industri Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah maka perlunya disusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Tengah (RPIP) tahun 2017-2037.

4.2 Landasan Sosiologis

Dengan luas wilayah yang sangat luas, Provinsi Kalimantan Tengah tentunya mempunyai keuntungan sekaligus tantangan dalam hal pemerataan pembangunan maupun kesejahteraan. Corak geografis maupun budaya masing-masing kabupaten/kota yang beragam diikuti dengan potensi yang tentunya beragam juga. Disinilah letak tantangan bagi Pemerintah Daerah bagaimana mengoptimalkan potensi apa yang dimiliki masing-masing atau bahkan bisa membuat satu sama lain saling menyokong atas produk maupun potensi yang dimiliki sehingga hakikat keberlanjutan bisa tercipta dalam pengembangan perindustrian ini.

Perlu adanya identifikasi maupun inventarisasi daya dukung dan daya tampung masing-masing sumber potensi yang ada di daerah tentunya merupakan kunci sukses perencanaan terhadap pengembangan industri yang dituangkan dalam Dokumen RPIP Kalimantan Tengah. Kebijakan pengembangan perindustrian di Kalimantan Tengah ini

tentunya harus terintegrasi dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tercapainya kepastian hukum baik bagi investor maupun bagi masyarakat sendiri yang seharusnya merasakan dampak positif secara langsung yaitu peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPIP Kalimantan Tengah harus betul-betul kebijakan yang berorientasi kepada masyarakat bukan hanya kepada investor.

Hal ini juga sesuai dengan filosofi masyarakat Kalimantan Tengah sendiri yaitu Belum Bahadat yang secara umum dapat diartikan semuanya mempunyai hak untuk berada atau eksis dan hak itu harus dihormati oleh semua pihak apabila diinginkan sebuah kehidupan yang damai dan berimbang. Keseimbangan dalam konteks pengembangan perindustrian disini adalah kebijakan Pemerintah Daerah haruslah mencapai keseimbangan antara kemajuan industri dengan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah sendiri. RPIP inilah sebagai instrumen perwujudan dari cita-cita tersebut yang akan dilegitimasi dengan bentuk Produk Hukum Daerah berupa Peraturan Daerah.

4.3 Landasan Yuridis

Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, bahwa pemerintah telah secara formal menjadikan perencanaan pengembangan dunia industri menjadi substansi penting dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini terlihat dengan adanya legitimasi peraturan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk ikut andil dalam merencanakan pengembangan dunia industri secara terarah dan terprogram melalui RPIP. Dari aturan tingkat Undang-Undang bahkan sampai tingkat aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Perindustrian telah dibentuk untuk mengikat keseriusan Pemerintah Daerah dalam memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan dunia industri ini. Untuk itulah perlu segera tindak lanjut oleh masing-masing stake holder dalam melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan ini.

Permasalahan-permasalahan bisa saja terjadi diakibatkan belum adanya perencanaan yang terprogram di daerah melalui RPIP tersebut. Dapat dipastikan perkembangan dunia industri akan berjalan lambat dan tidak terintegrasi dalam memaksimalkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Tentunya tidak lupa pengintegrasian ini tentunya memerlukan komitmen dari stake holder baik dari segi pendanaan, sarana prasarana, maupun komitmen dari segi regulasi daerah. Kunci dari

keberhasilan pengembangan industri di daerah jelas benar terletak ditangan pembuat kebijakan masing-masing daerah tersebut.

Melihat hal ini, perlu ada suatu kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencarikan solusi atas masalah ini. Dengan harapan apabila Pemerintah Daerah memiliki solusi, maka pengembangan industri di Provinsi Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan tentunya dampak ikutannya adalah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi lebih baik. Tentunya Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pengembangan Industri Provinsi inilah nanti merupakan penjabaran yang lebih rigid dari aturan-aturan di atasnya, sehingga diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang disebutkan di atas.

BAB V

RUANG LINGKUP, SASARAN, DAN ARAHAN PENGATURAN

NASKAH AKADEMIK RPIK GUNUNG MAS 2019-2039

5.1 Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas terkait Pembangunan Industri Kabupaten mencakup:

- A. Ketentuan Umum
- B. Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup
- C. Kewenangan Pemerintah Daerah
- D. RPIK 2019-2039
- E. Pembinaan dan Pengawasan
- F. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten
- G. Arahan Pengaturan (Industri Unggulan Kabupaten)
- H. Perwilayahan Industri
- I. Pembangunan Sumber Daya Industri
- J. Pemberdayaan Industri

5.2 Sasaran

Sasaran penyusunan Rencana Pembangunan Induk Kabupaten (RPIK) Gunung Mas 2019-2039 yaitu:

- D. Pembangunan sektor industri daerah secara optimal
- E. Pengurangan dampak lingkungan akibat pembangunan sektor industry
- F. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

5.3 Arahan Pengaturan

Penjabaran perumusan visi: **Bermartabat** adalah kondisi Kabupaten Gunung Mas memiliki dan mampu memelihara budaya dan adat istiadat yang luhur yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan golongan yang berbeda sehingga tidak mudah terpengaruh oleh dunia luar. **Maju** adalah bahwa tingkat perkembangan dan keberhasilan kegiatan pembangunan yang menempatkan Kabupaten Gunung Mas sejajar atau bahkan lebih maju dari Kabupaten/Kota atau daerah lain ditunjukkan dengan pesatnya

perkembangan pembangunan fisik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan mental spiritual masyarakat. **Berdaya saing** adalah mampu bersaing dan berkembang dengan tersedianya infrastruktur dasar di Kabupaten Gunung Mas guna peningkatan daya saing ekonomi, peningkatan sumberdaya manusia dan teknologi yang bertumpu pada potensi unggulan daerah. **Sejahtera** adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunung Mas melalui pembangunan ekonomi berasaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dan geografis, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengembangkan kemampuan penguasaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Mandiri** adalah mampu memanfaatkan potensi SDA yang melimpah dan keunggulan geografis melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, efisiensi dan efektivitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi pembangunan daerah Kabupaten Gunung Mas yaitu sebagai berikut:

- A. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah secara adil dan proposional
- B. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya Manusia (SDM)
- C. Meningkatkan daya saing ekonomi wilayah
- D. Mempercepat Reformasi Birokrasi
- E. Penegakan dan jaminan kepastian hukum (Law Enforcement)
- F. Mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal
- G. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)
- H. Memelihara dan meningkatkan keharmonisan antar masyarakat dalam rangka NKRI

Untuk mengakomodir arahan-arahan tersebut diatas maka misi pembangunan industri Kabupaten Gunung Mas yaitu:

“Industri Kabupaten Gunung Mas sebagai Generator Ekonomi Kerakyatan yang Unggul, Berdaya saing, dan Berkelanjutan Tahun 2039”

Penjabaran visi tersebut berdasarkan kata kunci ekonomi kerakyatan, unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui misi berikut:

- A. Mengembangkan industri berbasis potensi sumber daya alam unggulan daerah

- B. Meningkatkan daya saing produk dan pengelolaan sektor industri yang berkualitas di tingkat nasional
- C. Mencapai sektor industri yang adil dan seimbang berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

5.4 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Perumusan tujuan dan sasaran dilakukan berdasarkan 3 poin utama misi yang telah dijabarkan sebelumnya. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Gunung Masdapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Industri

Misi	Tujuan	Sasaran Kualitatif
Mengembangkan industri berbasis potensi sumber daya alam unggulan daerah	1. Terjalin sinergitas arah pembangunan sektor industri nasional dan daerah	1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SIKM 2. Ketersediaan SIKM sesuai potensi daerah 3. Diversifikasi Produk Industri
Meningkatkan daya saing produk dan pengelolaan sektor industri yang berkualitas di tingkat nasional	2. Pembangunan sektor industri daerah yang efektif dan terarah 3. Efisiensi penggunaan dan pengelolaan sumber daya untuk tujuan pembangunan sektor industri	1. Ketersediaan aspek-aspek penunjang produksi 2. Peningkatan kualitas SDM industri 3. Kemudahan Permodalan IKM
Mencapai sektor industri yang adil dan seimbang berdasarkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.	4. Hilirisasi sektor industri	1. Optimalisasi kelembagaan pembangunan industri 2. Peningkatan kerjasama antar stakeholder industri lokal, regional, nasional 3. Tercapainya IKM ramah lingkungan

Sasaran kuantitatif pembangunan industri Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Sasaran kuantitatif pembangunan industri

No	Sasaran	Satuan	Tahun Dasar (2019)	Tahun			
				2020	2024	2029	2039
1	Pertumbuhan bruto industri non-migas	%	4.09	5	6	7	7
2	Kontribusi sektor industri (dalam PDRB)	%	8.8	9	9	10	10
3	Nilai ekspor industri non migas	Juta Rp	-	100	120	250	480
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Orang	749	800	900	1500	2000
5	Nilai Investasi sektor industri	Juta Rp	21.8	120	150	300	500

5.5 STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Strategi pembangunan industri merupakan pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif. Program berisi rencana pengembangan produk, rencana infrastruktur, serta rencana pengembangan SDM dan SDA penunjang Industri. Strategi pembangunan industri dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Strategi dan Program Pengembangan Industri

Sasaran	Strategi	Program
1. Peningkatan kualitas dan kapasitas SIKM 2. Ketersediaan SIKM sesuai potensi daerah 3. Diversifikasi Produk Industri 4. Promosi Produk Industri	1. Optimalisasi pembangunan di SIKM eksisting 2. Penyiapan lokasi sentra IKM Baru 3. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Produk Unggulan Daerah 4. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam e-commerce	1. Pengusulan dana DAK fisik revitalisasi SIKM eksisting 2. Pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas standar penunjang operasional industri di SIKM eksisting 3. Penentuan Lokasi Sentra IKM baru dan penyiapan lahan (<i>Clean and Clear</i>) 4. Pengusulan dana DAK Fisik pembangunan sentra IKM Baru 5. Pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas standar penunjang operasional industri di SIKM baru 6. Pembuatan Kajian Produk

Sasaran	Strategi	Program
		Unggulan Daerah sebagai dasar penerbitan perda 7. Pembuatan website dan akun-akun media sosial resmi pemerintah
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan aspek-aspek penunjang produksi 2. Peningkatan kualitas SDM industri 3. Kemudahan Permodalan IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aksesibilitas dari dan menuju SIKM eksisting dan lokasi SIKM baru 2. Peningkatan kemampuan produksi dan kewirausahaan 3. Alokasi dana desa untuk pengembangan IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan telekomunikasi SIKM eksisting dan lokasi SIKM baru 2. Pelatihan, pendampingan, dan seminar motivasi bagi pelaku IKM dengan tema-tema peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan IKM 3. Penyertaan pendanaan pengembangan IKM desa dari sumber dana desa pada RKP
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kelembagaan pembangunan industri 2. Peningkatan kerjasama sektor industri 3. Tercapainya IKM ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan efektivitas komunikasi Lembaga 2. Evaluasi dan optimalisasi kerjasama sektor industri 3. Terselenggaranya aspek-aspek <i>sustainable development</i> pada IKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan forum komunikasi industri yang melibatkan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan swasta 2. Evaluasi kinerja MoU yang telah berjalan dan peningkatan jumlah MoU baru pemerintah daerah dengan stakeholder industri di tingkat lokal, regional, nasional (Lembaga pemerintah dan atau Lembaga non-pemerintah) 3. Pelatihan, pendampingan, dan seminar terkait penyelenggaraan industri ramah lingkungan bagi pelaku IKM

5.6 PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan RIPIN 2015-2035 dan RPIP Kalimantan Tengah 2017-2037, industri strategis sekaligus diarahkan pelaksanaannya sebagai industri hijau di Kalimantan Tengah, khususnya industri kecil dan menengah di daerah adalah industri kerajinan dan industri

olahan makanan. Pertimbangan juga didasarkan pada Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia 2017. Target pentahapan pengembangan kedua jenis industri tersebut dibagi kedalam tiga periode utama sesuai dengan arahan RIPIN, yaitu periode I (satu) 2019-2024, periode II (dua) 2024-2029, periode III (tiga) 2029-2039. Pentahapan pengembangan produk dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan 4.3.

A. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya - (16)

a. Industri barang dari kayu; industri barang dari gabus dan barang anyaman dari jerami, rotan, bambu dan sejenis - (162)

Unggulan (KBLI 2 Digit)	Jenis Industri (KBLI 5 Digit)			Wilayah Potensial
	2019-2024	2024-2029	2029-2039	
16	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang bangunan dari kayu (16221) ▪ Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan, dan Bambu (16294) ▪ Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu (16291) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang bangunan dari kayu (16221) ▪ Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan, dan Bambu (16294) ▪ Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu (16291) ▪ Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller (16293) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri barang bangunan dari kayu (16221) ▪ Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan, dan Bambu (16294) ▪ Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu (16291) ▪ Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller (16293) ▪ Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya ytdl (16299) 	Seluruh wilayah Kabupaten Gunung mas dengan Sentra di Kecamatan Sepang

Aspek Penunjang	Aspek Terkait
Sektor Kehutanan (Bahan Baku) Industri Kreatif (Branding dan Promosi)	Sektor Real Estate, Sektor Pendidikan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Sektor Perdagangan dan Jasa (Pasar)

B. Industri furnitur - (31)

b. Industri furnitur (Khususnya dari kayu, rotan dan bambu) - (3100)

Unggulan (KBLI 2 Digit)	Jenis Industri (KBLI 5 Digit)			Wilayah Potensial
	2019-2024	2024-2029	2029-2039	
31	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri furniture dari kayu (31001) ▪ Industri furnitur dari rotan dan atau bamboo (31002) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri furniture dari kayu (31001) ▪ Industri furnitur dari rotan dan atau bamboo (31002) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri furniture dari kayu (31001) ▪ Industri furnitur dari rotan dan atau bamboo (31002) ▪ Industri furniture lainnya (31009) 	Seluruh wilayah Kabupaten Gunung mas dengan Sentra di Kecamatan Sepang

Aspek Penunjang	Aspek Terkait
Sektor Kehutanan (Bahan Baku) Industri Kreatif (Branding dan Promosi)	Sektor Real Estate, Sektor Pendidikan, Sektor Administrasi Pemerintahan, Sektor Perdagangan dan Jasa (Pasar)

C. Industri Makanan - (10)

c. Industri pengolahan dan pengawetan daging (101)

Unggulan (KBLI 2 Digit)	Jenis Industri (KBLI 5 Digit)			Wilayah Potensial
	2019-2024	2024-2029	2029-2039	
10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas (10110) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas (10110) ▪ Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas (101330) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas (10110) ▪ Industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas (101330) 	Seluruh wilayah Kabupaten Gunung mas dengan Sentra di Kecamatan Kurun

Unggulan (KBLI 2 Digit)	Jenis Industri (KBLI 5 Digit)			Wilayah Potensial
	2019-2024	2024-2029	2029-2039	
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Industri produk makanan lainnya (10799) 	

Aspek Penunjang	Aspek Terkait
Sektor Peternakan (Bahan Baku) Industri Kreatif (Branding dan Promosi)	Sektor Perdagangan dan Jasa (Pasar)

Tabel 4. 2 Pentahapan Pengembangan (A dan B)

Produk Industri	Periode		
	(I) 2019-2024	(II) 2024-2029	(III) 2029-2039
1. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya 2. Industri furnitur	1. Pembukaan akses pemasaran online dengan akun resmi pemerintah Kabupaten Gunung Mas 2. Pendampingan pembentukan kelompok-kelompok usaha baru 3. Penguatan permodalan melalui koperasi/perbankan dan dana desa 4. Usulan Dana DAK Revitalisasi SIKM Kecamatan Sepang 5. Pemanfaatan Dana DAK Revitalisasi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perluasan kawasan ▪ Perbaikan dan pengembangan jaringan infrastruktur dan fasilitas dalam kawasan 	1. Pengadaan peralatan penunjang produksi 2. Evaluasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi program pemasaran ▪ Evaluasi kualitas SDM ▪ Evaluasi pemanfaatan dana permodalan ▪ Evaluasi dan Revitalisasi fisik kawasan 	1. Pengadaan peralatan penunjang produksi 2. Evaluasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi program pemasaran ▪ Evaluasi kualitas SDM ▪ Evaluasi pemanfaatan dana permodalan ▪ Evaluasi dan Revitalisasi fisik kawasan

Tabel 4. 3 Pentahapan Pengembangan (C)

Produk Industri	Periode		
	(I) 2019-2024	(II) 2024-2029	(III) 2029-2039
Industri Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan akses pemasaran online dengan akun resmi pemerintah Gunung Mas 2. Pendampingan pembentukan kelompok-kelompok usaha baru 3. Penguatan permodalan melalui koperasi/perbankan dan dana desa/BUMDes 4. Penyiapan calon lokasi (<i>Cleaning-Clearing</i>) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Usulan Dana DAK Pembangunan Sentra IKM Baru ▪ Pemanfaatan Dana DAK Pembangunan Baru: ▪ Perencanaan Pembangunan Sentra IKM baru di Kecamatan Kurun beserta DED, dan Amdal/UKL/UPL ▪ Pembangunan Gedung Produksi, Pusat promosi, dan Pergudangan ▪ Pengadaan peralatan penunjang produksi ▪ Pembangunan Kantor Pengelola/UPT Sentra IKM ▪ Pembangunan Instalasi air bersih, IPAL, IPP, Sambungan Internet dll 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan peralatan penunjang produksi 2. Evaluasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi program pemasaran ▪ Evaluasi kualitas SDM ▪ Evaluasi pemanfaatan dana permodalan ▪ Evaluasi pembangunan fisik kawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan peralatan penunjang produksi 2. Evaluasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evaluasi program pemasaran ▪ Evaluasi kualitas SDM ▪ Evaluasi pemanfaatan dana permodalan ▪ Evaluasi dan Revitalisasi fisik kawasan

5.7 PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

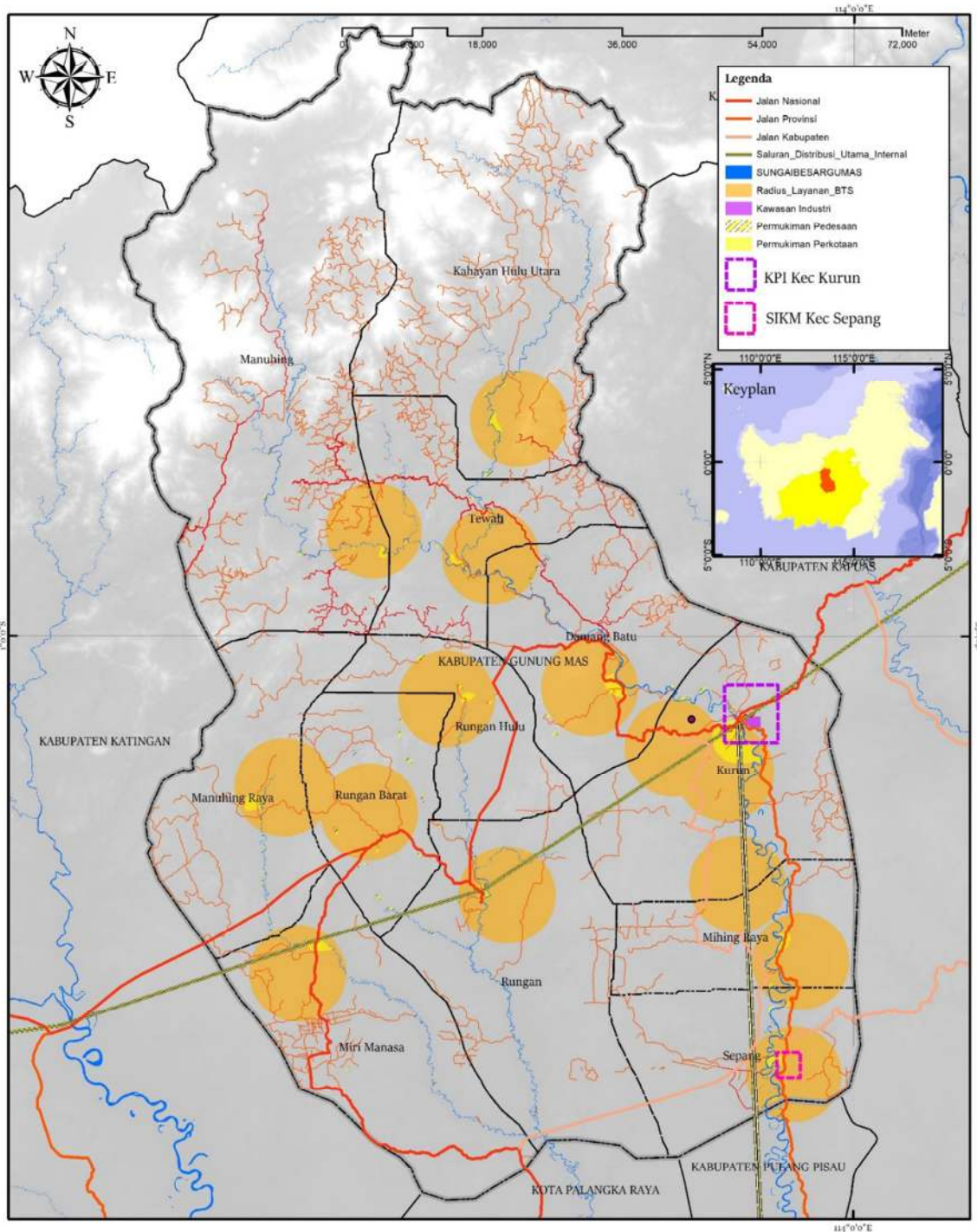
Pengembangan perwilayahan industri Kabupaten Gunung Mas adalah pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) baru sebagaimana terdapat dalam arahan RPIP Provinsi Kalimantan Tengah. Pengembangan perwilayahan dilakukan dalam upaya penentuan calon lokasi sentra IKM baru serta penyiapan lahan untuk memenuhi syarat clean dan clean lahan yang akan ditentukan sebagai lokasi Sentra IKM baru. Evaluasi lokasi eksisting KPI Kabupaten Gunung Mas dan lokasi eksisting SIKM Kecamatan Sepang terhadap syarat lokasi sentra IKM dan kondisinya saat ini di Kabupaten Gunung Mas dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Syarat Lokasi Pembangunan Sentra IKM dan Kondisi Eksisting

Kriteria	Ketentuan	KPI Kec. Kurun	SIKM Kec. Sepang	Keterangan
Jarak dengan Pusat Kota	Minimal 10 Km	Tidak sesuai	sesuai	Walaupun tidak sesuai, namun KPI berada di kurun seberang yang dipisahkan oleh lembah sungai Kahayan dari pusat kota
Jarak dengan Permukiman	Minimal 2 Km	Sesuai	Sesuai	-
Jaringan Transportasi Darat	Tersedia atau dekat dengan arteri Primer atau Jaringan Kereta Api	Sesuai	Sesuai	
Jaringan Infrastruktur	Tersedia atau dekat Jaringan Energi dan Telekomunikasi, Sumber Air Permukaan (Sungai, Danau, Waduk) dengan Debit Cukup	Sesuai	Sesuai	
Jaringan Transportasi Air	Tersedia/Dekat Dengan Pelabuhan	Tidak Sesuai	Tidak sesuai	Walaupun kedua lokasi tidak sesuai, namun Kabupaten Gunung Mas secara umum dekat dengan Ibukota Provinsi (Kota Palangka Raya), serta relatif dekat dengan kabupaten lain yang memiliki pelabuhan laut (Seruyan, dan Pulang Pisau)
Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Topografi Maksimal 15 Persen 	relatif	relatif	Kelerengan kawasan dapat diatur melalui pengerjaan <i>cut and fill</i>
	<ul style="list-style-type: none"> Daya dukung lahan pada range sigma 0,7-1,0 Kg/cm² 	relatif	relatif	-
	<ul style="list-style-type: none"> Kesuburan tanah minimal dan non-irigasi teknis 	sesuai	sesuai	-
	<ul style="list-style-type: none"> Harga lahan relatif rendah 	relatif	relatif	-
	<ul style="list-style-type: none"> Berada Dalam Kawasan Peruntukan 	sesuai	Tidak sesuai	SIKM Kecamatan. Sepang perlu diubah peruntukannya menjadi KPI

Kriteria	Ketentuan	KPI Kec. Kurun	SIKM Kec. Sepang	Keterangan
	Industri			
	<ul style="list-style-type: none"> Luas Minimal 50 Ha (termasuk didalamnya minimal 5 Ha untuk kawasan IKM) 	sesuai	Tidak sesuai	SIKM Sepang perlu perluasan lahan kawasan

Berdasarkan kriteria tersebut diatas maka kedua lokasi sebagian besar telah memenuhi persyaratan, dengan pertimbangan dan arahan kedepan untuk kedua lokasi tersebut yaitu erlunya pelaksanaan penyiapan lahan *land cleaning* dan *land clearing* untuk lokasi KPI di Kecamatan Kuala Kurun. Untuk lokasi SIKM Kecamatan Sepang perlu dilaksanakan perluasan lahan sehingga dapat dicapai luas lahan minimum untuk syarat SIKM.



Gambar 4.1 Lokasi KPI dan SIKM Eksisting Terhadap Kriteria
Sumber: Hasil Analisis. 2019

5.8 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA, TEKNOLOGI, INOVASI, KREATIVITAS, DAN PEMBIAYAAN INDUSTRI

Upaya pembangunan sumber daya industri difokuskan pada 2 (dua) komoditas utama yaitu hasil hutan berupa kayu dan rotan, serta peternakan hewan besar khususnya babi. Upaya pembangunan sumber daya industri meliputi:

- A. Penguatan sistem kerjasama dengan perusahaan pemegang IUPHHK terkait keberlanjutan penyediaan bahan baku kayu.
- B. Konservasi area-area habitat tumbuh rotan.
- C. Penguatan kerjasama dengan peternak hewan besar khususnya babi terkait keberlanjutan penyediaan ternak.

Program pembangunan sumber daya industri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun selama 20 tahun dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Program pembangunan sumber daya industri

Program		Tahun				Penanggungjawab
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039	
Pemanfaatan SDA Industri	Pengenalan/sosialisasi/studi lapangan tentang konservasi sumber daya alam khususnya bahan baku industri kepada anak-anak usia sekolah dasar dan menengah	√	√	√	√	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan dan Peternakan, Disperindag
	Memasukan program pengelolaan, perlindungan, dan pengembangan sumber daya komoditi/produk unggulan untuk setiap desa secara rutin dalam program dan anggaran tahunan desa	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, Disperindag
Pengembangan Teknologi Industri	Pengadaan peralatan penunjang produksi industri unggulan yang bersesuaian dengan kebutuhan pelaku usaha	√	√	√	√	Disperindag
	Pelaksanaan pendampingan operasionalisasi dan modernisasi industri untuk	√	√	√	√	Disperindag

Program	Tahun				Penanggungjawab
	2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039	
industri kecil dan menengah					
Perbaikan dan perawatan peralatan penunjang industri	√	√	√	√	Disperindag
Pengembangan Inovasi dan Kreativitas					
Pelaksanaan pelatihan produksi, pemasaran, operasional dan modernisasi peralatan penunjang industri bagi pelaku usaha secara rutin	√	√	√	√	Disperindag
Pembuatan forum komunikasi pengembangan industri yang didalamnya melibatkan unsur pemerintah, pengusaha swasta, masyarakat, dan akademisi	√	√	√	√	BAPPEDA, Disperindag
Pembiayaan Industri					
Pengembangan dan peningkatan efektivitas BUMDes dalam pengelolaan pembiayaan produksi dan pemasaran produk industri	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, Disperindag
Peningkatan kapabilitas KUD melalui fasilitasi kerjasama dengan perbankan, dan perusahaan besar, dan atau mekanisme pengelolaan bersama dengan Koperasi yang telah maju	√	√	√	√	Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa, Disperindag

5.9 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG INDUSTRI

Program yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana penunjang industri meliputi:

- A. Bantuan pengadaan peralatan produksi untuk unit-unit IKM yang berada di Kecamatan
- B. Bantuan teknologi sederhana tepat guna di bidang kelistrikan dan air bersih untuk unit-unit IKM di Kecamatan

C. Pemanfaatan dana DAK Fisik Bidang Industri dalam pembangunan Sentra IKM lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang produksi dan promosi di dalamnya

D. Pengikutsertaan promosi produk industri dalam website pemerintah daerah

Program pembangunan sarana dan prasarana penunjang industri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun selama 20 tahun adalah sebagai berikut:

Program		Tahun				Penanggungjawab
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039	
Pengembangan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan	Aplikasi dan ujicoba teknologi sederhana tepat guna terkait listrik terbarukan pada desa-desa khususnya dengan keunggulan IKM	√				Disperindag, Dinas PUPR, BAPPEDA
	Pengaplikasian teknologi sederhana tepat guna listrik terbarukan untuk menunjang produksi IKM di desa		√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disperindag, Dinas PUPR, BAPPEDA
Pengembangan fasilitas jaringan sumber daya air	Pembangunan sumur, tandon, dan jaringan air khusus untuk menunjang IKM di Desa	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disperindag, Dinas PUPR, BAPPEDA
	Pengalokasian subsidi air bersih untuk tujuan produksi IKM di desa	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disperindag, Dinas PUPR, BAPPEDA
Pengembangan fasilitas sanitasi	Pembangunan IPAL komunal dan sistem persampahan khusus untuk IKM di Desa	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disperindag, Dinas PUPR, BAPPEDA
Pengembangan fasilitas	Pemberian subsidi pengangkutan sungai	√	√	√	√	Pemerintah Kecamatan,

Program		Tahun				Penanggungjawab
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039	
transportasi	untuk barang hasil produksi IKM					Pemerintah Desa, Disperindag, Dinas Perhubungan, BAPPEDA
	Penyediaan angkutan sungai khusus barang		√	√	√	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Disperindag, Dinas Perhubungan, BAPPEDA
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Sosialisasi SIINas	√	√	√	√	Disperindag, Dinas Kominfo, BAPPEDA
	Pendampingan pendaftaran dan pengisian SIINas	√	√	√	√	Disperindag, Dinas Kominfo, BAPPEDA
Infrastruktur Penunjang Standarisasi Industri	Fasilitasi pelaku IKM dalam mendapatkan standarisasi dan sertifikasi kualitas produk hasil industri	√		√	√	Disperindag
	Pembangunan perwakilan rumah kemasan di Kabupaten	√				Disperindag, Dinas PUPR, BAPPEDA

5.10 PEMBERDAYAAN INDUSTRI

Rantai pemberdayaan industri perlu melibatkan berbagai elemen, baik dari pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Beberapa program terkait pemberdayaan industri yaitu:

- A. Sosialisasi RPIK kepada unit-unit usaha industri di Desa
- B. Pendataan pelaku usaha industri
- C. Focus Grup Discussion dalam menggagas program ekonomi unggulan desa khususnya sektor IKM untuk masuk dalam Rencana Kegiatan dan Program (RKP) Desa agar dapat diusulkan dalam bantuan Dana BUMDes prioritas.

Program Pemberdayaan industri dalam jangka waktu 5 (lima) tahun selama 20 tahun adalah sebagai berikut:

Program		Tahun				Penanggungjawab
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039	
Pembangunan SDM Industri	Pengenalan/sosialisasi/studi lapangan tentang komoditi unggulan dan industri unggulan kabupaten kepada anak-anak usia sekolah dasar dan menengah	√	√	√	√	Dinas Pendidikan, Disperindag
	Memasukkan kompetensi produksi dan pemasaran hasil komoditi unggulan dan industri unggulan dalam kurikulum ekstrakurikuler sekolah dasar dan menengah	√	√	√	√	Dinas Pendidikan, Disperindag
	Pelaksanaan pendampingan produksi dan pemasaran bagi pelaku usaha komoditi unggulan dan industri unggulan pada tingkat kecamatan dan kabupaten secara rutin	√	√	√	√	Disperindag
Kebijakan Afirmatif	Prioritisasi pengembangan IKM (perijinan, pelatihan, pendampingan, bantuan, dll) pada IKM milik masyarakat lokal yang diusahakan pada wilayah kabupaten dengan produk utama yang berkesesuaian dengan arahan pembangunan industri	√	√	√	√	Pemerintah Daerah
	Pemberian penghargaan tahunan dan insentif berupa bantuan peralatan dan permodalan bagi pelaku IKM yang memiliki peran dalam peningkatan ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Kategorisasi penghargaan meliputi: industri strategis;	√	√	√	√	Pemerintah Daerah

Program		Tahun				Penanggungjawab
		2019-2024	2024-2029	2029-2034	2034-2039	
Pembangunan SDM Industri	Pengenalan/sosialisasi/studi lapangan tentang komoditi unggulan dan industri unggulan kabupaten kepada anak-anak usia sekolah dasar dan menengah	√	√	√	√	Dinas Pendidikan, Disperindag
	Memasuki kompetensi produksi dan pemasaran hasil komoditi unggulan dan industri unggulan dalam kurikulum ekstrakurikuler sekolah dasar dan menengah	√	√	√	√	Dinas Pendidikan, Disperindag
	Pelaksanaan pendampingan produksi dan pemasaran bagi pelaku usaha komoditi unggulan dan industri unggulan pada tingkat kecamatan dan kabupaten secara rutin	√	√	√	√	Disperindag
	industri hijau; dan P3DN bagi SOPD (dengan insentif sesuai RIPIN dan kesanggupan daerah)					
	Pemanfaatan produk IKM lokal sebagai pilihan utama di wilayah Kabupaten	√	√	√	√	Seluruh elemen pemerintah dan masyarakat
Pemberdayaan IKM	Memperluas jaringan dan perwakilan PKBM ke setiap kecamatan sebagai basis peningkatan kemandirian rumah tangga khususnya IKM	√	√	√	√	PKBM, Disperindag

5.11 SASARAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF PROGRAM

Sasaran Kualitatif dan Kuantitatif Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunung Mas merupakan penjabaran program-program yang telah dirumuskan berdasarkan prioritas pelaksanaan. Prioritisasi perlu dilakukan agar pelaksanaan dapat berjalan efektif

dan efisien. Pentahapan pelaksanaan indikasi program dibagi dalam tiga tahapan yaitu periode I (satu) 2019-2024, periode II (dua) 2024-2029, periode III (tiga) 2029-2039 :

PROGRAM	Satuan	TAHAPAN		
		(I) 2019- 2024	(II) 2024- 2029	(III) 2029- 2039
Pengembangan Produk Industri Unggulan Kabupaten (Sesuai Tabel 3.7 & 5.8)	Kegiatan	30%	60%	100%
Penentuan Lokasi Sentra IKM baru dan penyiapan lahan (<i>Clean and Clear</i>)	Ketersediaan Lokasi	100%	-	-
Pembuatan Kajian Produk Unggulan Daerah	Jumlah Kajian	100%	-	-
Pembuatan Kajian Zonasi Kawasan-Kawasan Strategis Daerah	Jumlah Kajian	100%	-	-
Penyertaan program penunjang kegiatan industri yang berkesesuaian dengan kompetensi ekonomi dan industri desa yang berkesesuaian dengan Permendes PDPT No.19 2017 dalam RKP Desa	Jumlah Kegiatan	30%	60%	100%
Peninjauan kembali RTRW Kabupaten	Pelaksanaan	100%	-	-
Revisi RTRW Kabupaten dengan memasukan usulan KPI baru	Pelaksanaan	100%	-	-
Penyediaan lteknologi sederhana tepat guna untuk menunjang energi kelisrikan desa dengan potensi Industri	Ketersediaan	100%	-	-
Pendataan dan penyediaan sambungan air bersih untuk rumah tangga industri kecil dan menengah di setiap Kecamatan	Unit Rumah	30%	60%	100%
Bantuan permodalan melalui BUMDES, Koperasi, Perbankan untuk IKM-IKM potensial di setiap Kecamatan	Unit Usaha	30%	60%	100%
Pendirian Kelompok Kerja (POKJA) Pembangunan Industri yang terdiri atas elemen pelaku usaha industrim, pelaku sektor ekonomi primer, dan pemerintah sebagai wadah koordinasi pembangunan IKM	Pelaksanaan	100%	-	-
Kerjasama dengan SMK Negeri di daerah dalam hal penyertaan kurikulum yang berkesesuaian dengan kompetensi industri daerah	Jumlah Kerjasama	30%	60%	100%
Kerjasama dengan perguruan tinggi terkait pengembangan sumber daya industri, penelitian dan pengabdian. Pengembangan Desa Binaan yang diprioritaskan memiliki potensi IKM	Jumlah Kerjasama	30%	60%	100%

PROGRAM	Satuan	TAHAPAN		
		(I) 2019- 2024	(II) 2024- 2029	(III) 2029- 2039
Re-design dan koneksi website daerah dengan website SOPD. Penyediaan halaman khusus promosi produk industri	Pelaksanaan	100%	-	-
Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan toko online dengan menggunakan akun resmi pemerintah daerah	Unit Usaha	30%	60%	100%

Keterangan:

Target dalam satuan persen merepresentasikan bagian persentase yang tercapai dibandingkan dengan persentase tercapai keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Gunung Mas memuat Rencana Pengembangan produk, Rencana Pengembangan Industri, dan rencana Perwilayahan Industri. Semua program pengembangan diarahkan dalam 3 (tiga) periodisasi pentahapan dan berbasis prioritas pelaksanaan.

6.2 Saran

Urgensi dan nilai strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Gunung Mas 2019-2039 yaitu:

- A. Mencapai sinergitas pembangunan khususnya sektor industri
- B. Mencapai peningkatan perekonomian melalui nilai tambah sektor dan komoditi unggulan daerah
- C. Percepatan pembangunan

Disamping nilai Urgensi dan nilai strategis tersebut diatas, hal yang paling utama yang menjadi tujuan akhir pembangunan melalui Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Gunung Mas 2019-2039, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat secara merata di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, S. Bachtiar. 2010. Meyakinkan Validitas Data melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. Surabaya. UNS (Penelitian tidak dipublikasikan). Hal. 48.
- Basuki, Mahmud. Mujiraharjo, N Febri. 2017. Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri*, Vol. 15, No. 1, Desember 2017, pp.52 - 60
- David, E M. David, R F. David, R Fred. 2009. The Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) Applied to a Retail Computer Store. *The Coastal Business Journal Spring 2009: Volume 8, Number 1*.
- Dipta, I Wayan. 2014. Improvement Rural Living Condition Through One Village One Product (Ovop) Movement. Jakarta: Kementerian Koperasi dan IKM.
- Hasanah, Hasyim. 2016. Teknik-Teknik Observasi, Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial. *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2016
- Hendayana, Rachmat. 2003. Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Informatika Pertanian Vol. 12*.
- Undang-undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan RPIP dan RPIK
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri.
- Rahmawati N, Imami. 2017. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11, No.1, Maret 2007; hal 35 - 40.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
- Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2016-2022

Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Tengah Tahun 2017-2037.

Sandriana, Niskha. Hakim, Abdul. Saleh, Chairul. 2015. Strategi Pengembangan Produk
Unggulan Daerah Berbasis Klaster di Kota Malang. ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN
2407-6864 (Online) Vol. 5, No. 1, 2015.

Salampak, Masliani, Tiawon Harin. 2017. Masterplan Pengembangan Kawasan Berbasis
Komoditas Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kotawaringin Barat. UB Press.,
Malang.

Tjahjono, K Heru. 2013. Studi Literatur Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan
Prosedural pada Konsekuensinya dengan Teknik Meta Analisis. Jurnal Psikologi.
Volume 35, No. 1, 21 - 40